

Dr. Harlen Simanjuntak, M.Pd.

PENGANTAR PENDIDIKAN

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat-Nya, penyusunan buku “ Pengantar Pendidikan “ dapat diselesaikan dengan baik. karena akhirnya buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari dan memahami Pengantar Ilmu Pendidikan. Saya merasa bahwa bahan ini sangat jauh dari layak untuk dijadikan sebuah buku, namun dengan pertimbangan bahwa alangkah baiknya jika hal tersebut dapat dibaca kembali, serta harapan bahwa para pembaca berkenan memberikan umpan balik, kritik dan saran, maka akhirnya saya memberanikan diri untuk menerbitkannya.

Pola penyajian buku ini penulis upayakan sistematis mungkin, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Penulis berharap, buku ini dapat bermamfaat, khususnya bagi mahasiswa dan umumnya bagi pembaca.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih pada pihak-pihak yang sudah membantu. Sangat disadari bahwa buku ini masih belum memuat materi yang dibutuhkan dan penjelasan yang komprehensif tentang Pengantar ilmu pendidikan. Karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan.

Penulis,

Dr. Harlen Simanjuntak, M.Pd.

Dr. Harlen Simanjuntak, M.Pd.

Daftar Isi

| | |
|---------------------------|-----|
| Ucapan Terima Kasih | iii |
| Daftar Isi | v |

BAGIAN 1

Pendahuluan

| | |
|----------------------------------|---|
| Manusia dan Pendidikan | 1 |
| Dinamika Kehidupan Manusia | 6 |

BAGIAN 2

Memahami Pendidikan

| | |
|---|----|
| Pengertian Pendidikan | 7 |
| Kebutuhan Manusia terhadap Pendidikan | 14 |
| Pendidikan sebagai Ilmu | 20 |
| Pendidikan di Era Global | 23 |

BAGIAN 3

Faktor - Faktor Determinan dalam Pendidikan

| | |
|-----------------------------|----|
| Tujuan Pendidikan | 29 |
| Faktor Pendidik | 33 |
| Faktor Peserta Didik | 43 |
| Lingkungan Pendidikan | 46 |
| Lingkungan Keluarga | 47 |
| Lingkungan Sekolah | 52 |

| | |
|------------------------------------|----|
| Lingkungan Sosial Masyarakat | 56 |
| Alat Pendidikan | 60 |

BAGIAN 4

Landasan Pendidikan

| | |
|---|----|
| Landasan Filosofis dalam Pendidikan | 63 |
| Landasan Psikologis dalam Pendidikan..... | 64 |
| Landasan Sosiologis dalam Pendidikan..... | 66 |
| Landasan Historis Pendidikan | 66 |
| Landasan Kultural | 67 |
| Inovasi Pendidikan..... | 67 |
| Landasan Psikologi dalam Pendidikan | 69 |
| Pertumbuhan dan Perkembangan | 70 |
| Arti Penting Perkembangan Terhadap Proses Pembelajaran | 72 |

BAGIAN 5

Administrasi Pendidikan

| | |
|--|-----|
| Administrasi Kurikulum..... | 77 |
| Kurikulum dan Pembelajaran | 79 |
| Fungsi kurikulum | 84 |
| Tujuan kurikulum..... | 91 |
| Pengembangan Kurikulum..... | 92 |
| Langkah-langkah pengembangan kurikulum | 95 |
| Tahap-tahap pengembangan kurikulum..... | 97 |
| Implementasi Kurikulum Dalam Proses Pembelajaran | 99 |
| Implementasi kurikulum dan permasalahannya | 101 |
| Standarisasi Pendidikan | 102 |

BAGIAN 6

Pendidikan di Indonesia

Politik dan Pendidikan di Era Otonomi Daerah 117

DAFTAR PUSTAKA123

BAGIAN 1

Pendahuluan

Manusia dan Pendidikan

Realitas menunjukkan bahwa kehidupan manusia cenderung digolongkan kepada dua arah, yaitu manusia dengan kecenderungan pada kebaikan dan manusia dengan kecenderungan pada hal yang bertentangan dengan kebaikan itu sendiri. *Baik* dan *tidak baik* dalam istilah ini tentu bersifat normatif, baik menurut pandangan umum maupun berdasarkan pada norma tertentu, seperti adat istiadat, maupun norma-norma agama.

Manusia dalam mencapai predikat manusia sempurna (*insan kamil*) sebagai puncak tertinggi hakekat kehidupannya, perlu menemukan kembali formula dan arahnya di dalam sistem dan struktur sosial masyarakat. Formula yang dimaksud tiada lain adalah

formula-formula pendidikan yang sedemikian penting, untuk kembali memperoleh penguatan dan direvitalisasi.

Karena itu, pendidikan menjadi pusat dari semua upaya membangun citra manusia paripurna, dan menjadikan pendidikan sebagai titik pijak dan strategi utama di dalam membentuk manusia yang berkualitas, insan paripurna.

Hal yang sangat sulit dibayangkan bahwa manusia hidup dalam dunia tanpa pendidikan di dalamnya. Bagaimana mungkin manusia berkembang dengan peradaban sedemikian rupa tanpa suatu upaya yang sistematis melalui pendidikan. Dalam beberapa aspek memang kadang terjadi kerancuan antara prestasi kemajuan yang ditandai oleh berbagai penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan efek yang kemudian timbul dari berbagai pemahaman tentang pemanfaatan teknologi itu sendiri. Suatu hal yang tentu kontradiktif, terlebih lagi jika berbagai aspek yang dikalim sebagai bagian dari kemajuan tersebut sering bertentangan dengan aspek-aspek normatif di dalam kehidupan.

Dengan demikian, sebuah pemahaman tentang pendidikan dalam arti yang *pure* bagi semua umat manusia menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Mungkin pemikiran ini akan menimbulkan kesulitan tersendiri karena banyaknya anasir-anasir yang berpengaruh terhadap pemahaman seseorang, tetapi setidaknya terdapat titik temu yang menunjukkan bahwa pendidikan merupakan satu-satunya usaha yang dapat membawa manusia kepada kehidupan yang bermartabat.

Dinamika Kehidupan Manusia

Kenyataan hidup manusia menunjukkan bahwa manusia mengalami kehidupan yang dinamis. Dinamika kehidupan tersebut terciptanya dari upaya manusia untuk hidup lebih baik dari waktu ke waktu. Mengapa demikian, tidak lain karena kemampuan manusia yang dianugerahkan oleh Allah Swt., sebagai makhluk yang sempurna.

Kebudayaan dan peradaban yang berkembang adalah buah dari dinamika kehidupan manusia serta menjadi bukti bahwa manusia memiliki keunggulan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya.

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa pendidikan merupakan anasir penting dalam kehidupan manusia yang secara substansial mempengaruhi seluruh kehidupannya. Suatu kenyataan yang membuktikan bahwa pendidikan adalah instrumen utama bagi pembangunan kehidupan umat manusia dengan berbagai hasil yang telah diraihinya. Adalah sebuah keniscayaan membayangkan bahwa peradaban umat manusia dapat dibangun tanpa pendidikan.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa dinamika kehidupan manusia adalah buah dari proses pendidikan yang terjadi secara semesta, dan saling berkontribusi di antara sesama umat manusia.

BAGIAN 2

Memahami Pendidikan

Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang *inheren* dengan kehidupan. Pemahaman seperti ini, mungkin terkesan dipaksakan, tetapi jika mencoba merunut alur dan proses kehidupan manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan telah mewarnai jalan panjang kehidupan manusia dari awal hingga akhir. Pendidikan menjadi pengawal sejati dan menjadi kebutuhan asasi manusia. Pendidikan adalah pengawal sejati dan menjadi kebutuhan asasi manusia. V.R. Taneja, mengutip pernyataan Proopert Lodge, bahwa *life is education and education is life*.⁴ Itu berarti bahwa membicarakan manusia akan selalu bersamaan dengan pendidikan, dan demikian sebaliknya.

Perdebatan tentang pendidikan, hemat penulis bukan terletak pada perlu atau tidaknya pendidikan bagi manusia, tetapi lebih kepada bagaimana pendidikan itu dilaksanakan, apa saja yang harus dicapai (tujuan) dan bagaimana tata kerja para pelaksana (pendidik).

2 V.R.Taneja, *Socio-Philosophical Approach to Education*, (New Delhi: Atlantic Publisher, 2005), h.

Oleh karena itu, pendidikan kemudian didefinisikan dalam beragam pendapat dan statement. Keragaman pendapat merupakan hal yang patut disyukuri sehingga membuka peluang untuk membandingkan berbagai pendapat dan menambah khazanah pengetahuan. Beberapa definisi pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut. Dalam Kamus besar disebutkan

Pendidikan artinya proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik.⁵

Menurut pengertian tersebut, pendidikan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik. Para ahli tak ketinggalan mengemukakan beberapa definisi, di antaranya:

a. Edward Humrey:

*“... education mean increase of skill of development of knowledge and undertanding as a result of training, study or experience...”*⁶
(Pendidikan adalah sebuah penambahan ketrampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil latihan, studi atau pengalaman...)

b. Ki Hajar Dewantara seperti dikutip Alisuf Sabri bahwa:

Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-

3 Dep. P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1987), h. 204

4 Edward Humrey, Encyclopedia Internasional. (New York: Grolier, 1975), h. 247.

tingginya.⁷

c. Driyarkara

Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda.⁸

Definisi di atas, menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha sistematis yang bertujuan agar setiap manusia mencapai satu tahapan tertentu di dalam kehidupannya, yaitu tercapainya kebahagiaan lahir dan batin.

Arti penting pendidikan, menempatkannya pada strata tertinggi kebutuhan manusia. Karena itu, pendidikan menjadi barometer kemajuan dan peradaban. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat pendidikan bangsa tersebut. Tidaklah mengherankan jika kemudian negara mengatur dan menjadikan pendidikan sebagai salah satu persoalan penting yang harus dibenahi dengan sebaik-baiknya. Nelson Mandela dalam pengantar buku yang ditulis oleh Klaus Dieter Bieter, menyebut pendidikan sebagai kekuatan dahsyat yang membangun setiap Insan, dan seluruh negara di dunia

5 Alisuf Sabri, Ilmu Pendidikan. (Cet. I, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1999), h. 5.

6 Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan. (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 4.

7 Nasir A. Baki, Arah Studi Keislaman di Indonesia, Makalah disampaikan pada Pembukaan Kuliah Umum Pascasarjana STAIN Panagkaraya Kalimantan Tengah, pada tanggal 23 Oktober 2014.

menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi.¹⁰

Demikian halnya dengan Indonesia, pendidikan merupakan satu bidang yang menjadi tanggung jawab Negara. Pembukaan UUD 1945 jelas mengamanatkan untuk “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Amanat tersebut secara hirarkis dituangkan ke dalam berbagai Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pendidikan. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹¹

Dari definisi di atas, terlihat bahwa usaha pendidikan berupaya mengarahkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal agar terwujud suatu kepribadian yang paripurna pada dirinya. Harapan terhadap dunia pendidikan sangat besar untuk membawa peserta didik ke arah kualitas hidup yang sebaik-baiknya.

Jika pendidikan diproyeksikan sebagai wahana bagi manusia untuk mencapai tujuan yaitu terwujudnya kepribadian paripurna, maka pertanyaan yang penting untuk diulas adalah benarkah pendidikan dapat mencapai semua hal tersebut? Apa yang mendasari

8 Klaus Dieter Bieter, *The Protection of The Right to Education by International Law*, (Leiden: Koninlijke Brill, 2006), h. 1.

9 Sekretariat Negara RI., *Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, dan *Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, cet. Ke II, (Jakarta: Visimedia, 2007), h.2.

sehingga terbukti suatu keyakinan bahwa manusia memang dapat dididik dan mencapai paripurna.

Secara substansial pendidikan merupakan kebutuhan asasi dan secara khusus hanya dapat dilakukan terhadap manusia. Makhluks selain manusia tidak memiliki kemungkinan untuk dididik. Manusalah satu-satunya makhluk yang dapat dididik. Ini disebabkan karena pada diri manusia terdapat potensi insaniah, suatu potensi yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk selain manusia.

Setiap manusia lahir membawa "*fitrah*". *Fitrah* sesungguhnya adalah potensi dasar, suatu potensi diri yang masih harus dikembangkan, hingga mencapai tahapan-tahapan yang jika terus menerus dikembangkan akan mencapai titik tertinggi. Karena itu, dapat dirumuskan definisi pendidikan sebagai usaha mengembangkan potensi *fitrah* insaniah menuju tercapainya insan paripurna.

10 Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhary wa Muslim*, Diterjemahkan oleh Arief Rahman hakim dengan judul "Kumpulan Hadist Shahih Bukhary Muslim, (Solo: Insan Kamil Solo, 2012), h. 817.

Untuk memahami definisi tersebut, dibutuhkan elaborasi terhadap beberapa istilah yang menjadi elemen penting, yaitu “potensi”, “fitrah” dan “insan paripurna”.

Setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang. Potensi tersebut merupakan anugerah *Ilahiah* yang telah ada sejak lahir. Karenanya, manusia mampu menyerap berbagai nuansa pendidikan yang ada di sekelilingnya sejak ia masih kecil (bayi) atau bahkan ketika masih berada dalam kandungan. Quraish Shihab, menyimpulkan bahwa manusia sejak awal kejadiannya membawa potensi beragama yang lurus, dan dipahami oleh para ulama sebagai tauhid.¹³

Potensi manusia yang dimaksud tiada lain adalah fitrah yang dibawa sejak lahir. Setiap manusia memiliki *fitrah* (nilai-nilai kesucian) yang secara potensial berada pada diri setiap insan untuk selanjutnya dibina dan dikembangkan dalam usaha-usaha pendidikan.

Fitrah sebagai potensi nilai-nilai kesucian, tidak akan memiliki makna apapun jika tidak dikembangkan. Oleh karena itu, kehadiran pendidikan menjadi wahana untuk mengembangkan potensi fitrah sehingga setiap potensi fitrah insaniah dapat dimunculkan (diwujudkannyatakan) untuk kemudian dikembangkan.

Wujud fitrah itu sendiri, merupakan nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal yang ada pada diri setiap insan. Setiap manusia memiliki nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan banyak lagi nilai-nilai suci dan baik lainnya, yang pada prinsipnya adalah milik setiap insan.

Namun demikian, walaupun setiap insan telah dianugerahkan

11 Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. III, (Jakarta: Mizan, 1996), h. 284.

potensi tersebut, tetapi berbagai potensi itu tidak dikembangkan dan tidak diaktualisasikan, maka dia tidak akan memiliki makna apapun. Untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi nilai-nilai kesucian itulah yang kemudian menjadi tugas pendidikan.

Demikianlah “*fitrah*” yang ada pada diri manusia. Potensi yang bersifat positif, dan sekaligus mengindikasikan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan di dalam pendidikan semata-mata hanyalah nilai-nilai positif.

Elemen kedua dari definisi pendidikan yang dikemukakan di atas adalah “insan paripurna”. Istilah ini sesungguhnya lebih mengacu kepada bagaimana memotivasi diri sehingga mencapai derajat yang lebih tinggi. Mencapai insan paripurna menyisakan pertanyaan tentang batasannya. Seperti apakah wujud insan paripurna itu?

12 Dep.Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 325

Insan paripurna tiada lain adalah ungkapan agar manusia tidak akan pernah puas dengan capaian prestasi yang telah mampu diraihinya. Ini pun bermakna bahwa manusia tidak boleh berhenti untuk menyempurnakan apa yang telah ada sebelumnya, walaupun kesempurnaan yang hakiki tidak akan pernah tercapai karena batas kesempurnaan itu sendiri tidak ada manusia yang dapat mengukurnya. Insan paripurna menjadi tujuan dari setiap usaha pendidikan.

Tujuan pendidikan untuk mencapai insan paripurna tiada lain adalah motivasi yang mendorong manusia untuk senantiasa mengembangkan potensi fitrah pada dirinya secara maksimal melalui pendidikan tiada henti, yang sering disebut dengan pendidikan sepanjang hayat (*life long education*).

Mencapai insan paripurna tentu menjadi tujuan yang sangat ideal, dan tujuan seperti itu hanya mungkin dicapai oleh manusia melalui pendidikan karena pendidikan memang ditujukan untuk manusia. Makhluk selain manusia tidak memiliki kemungkinan untuk dididik. Manusia satu-satunya makhluk yang dapat dididik, karena hanya pada diri manusia terdapat potensi insaniah, suatu potensi yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk yang lain.

Kebutuhan Manusia terhadap Pendidikan

Mengapa manusia membutuhkan pendidikan? Jika merujuk pada definisi yang telah dikemukakan maka dapat dipahami bahwa kebutuhan manusia terhadap pendidikan merupakan sebuah kebutuhan primer. Herbert Spencer, seperti dikutip oleh Jumransyah, mengemukakan bahwa pendidikan adalah mempersiapkan manusia untuk hidup sempurna.¹⁵

13 Jumransyah dan Abdul Malik KA., Pendidikan Islam, Menggali “tradisi” Mengukuhkan

Persoalan pokok yang dihadapi oleh manusia adalah menghadapi kenyataan hidup yang dijalaninya. Anasir kehidupan manusia yang kompleks, menjadikan hidup tidak dapat disederhanakan begitu saja. Satu sisi manusia adalah makhluk individu, tetapi di sisi lain manusia berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lain di sekitarnya. Kemampuan manusia berorganisasi dan berinteraksi dengan manusia lain, menjadikan manusia memiliki banyak pengalaman yang menjadikan hidup lebih berwarna, dinamis dan melahirkan peradaban. Suatu gejala yang mengindikasikan bahwa manusia sejak awal telah berupaya mengembangkan hidupnya sekaligus menjadi sinyal bahwa manusia mampu melatih kemampuan dan mengembangkan dirinya melalui latihan dan pendidikan. Karena itu, sejarah pendidikan sama tuanya dengan kehadiran manusia di bumi ini. Sudarwan Danim, menyebut bahwa pendidikan telah ada sejak evolusi awal umat manusia.¹⁶

Di dalam perkembangannya, manusia tidak hanya melatih dan mengembangkan dirinya hingga batas tertentu, tetapi manusia secara berkesinambungan melatih dan mengembangkan kehidupannya hingga mencapai titik tertinggi dan usaha tersebut dilakukan secara terus menerus hingga akhir kehidupan. Secara individu manusia menghendaki capaian tertinggi, yaitu manusia paripurna (*insan kamil*) dan dalam kehidupan sosial pun demikian.

Untuk mencapai predikat manusia sempurna (*insan kamil*) sebagai puncak tertinggi hakekat kehidupannya, maka manusia mengembangkan diri melalui upaya sistematis dan terencana serta

Eksistensi, cet.1, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h.12

14 Sudarwan Danim, Pengantar Kependidikan: Landasan, Teori dan 234 Metafora Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 1.

dalam kerangka konsep yang jelas. Konsep inilah yang disebut sebagai pendidikan. Karena itu, pendidikan menjadi pusat dari semua upaya membangun citra manusia paripurna, dan menjadikan pendidikan sebagai titik pijak dan strategi utama di dalam membentuk manusia yang berkualitas, insan paripurna. Menurut Muhaimin, pendidikan merupakan hal yang tidak pernah berhenti dibicarakan, karena menurut fitrahnya manusia senantiasa menghendaki pendidikan yang lebih baik.¹⁷

Hal yang sangat sulit dibayangkan bahwa manusia hidup dalam dunia tanpa pendidikan di dalamnya. Bagaimana mungkin manusia berkembang dengan peradaban sedemikian rupa tanpa suatu upaya yang sistematis melalui pendidikan. Dalam beberapa aspek memang kadang terjadi kerancuan antara prestasi kemajuan yang ditandai oleh berbagai penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan efek yang kemudian timbul dari berbagai pemahaman tentang pemanfaatan teknologi itu sendiri. Suatu hal yang tentu kontradiktif, terlebih lagi jika berbagai aspek yang dikalim sebagai bagian dari kemajuan tersebut sering bertentangan dengan aspek-aspek normatif di dalam kehidupan.

Dengan demikian, sebuah pemahaman tentang pendidikan dalam arti yang *pure* bagi semua umat manusia menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Mungkin pemikiran ini akan menimbulkan kesulitan tersendiri karena banyaknya anasir-anasir yang berpengaruh terhadap pemahaman seseorang, tetapi setidaknya terdapat titik temu yang menunjukkan bahwa pendidikan merupakan satu-satunya usaha yang dapat membawa manusia kepada kehidupan yang bermartabat.

15 Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum, hingga Strategi pembelajaran, Ed.1, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.2.

Pendidikan pada manusia bertujuan untuk melatih dan membiasakan manusia sehingga potensi, bakat dan kemampuannya menjadi lebih sempurna. Ini menggambarkan bahwa manusia membutuhkan pendidikan untuk menjadikan manusia lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna.

Melalui pendidikan, manusia membuktikan diri sebagai makhluk yang paling sempurna, dari sebelumnya hanya memiliki potensi (yang belum memiliki arti apa-apa), tetapi melalui pendidikan, mereka berkembang menjadi lebih sempurna dan terus menyempurnakan diri.

Keadaan manusia yang belum tahu apa-apa (karena hanya memiliki potensi), tetapi dengan belajar dari mendengar, belajar dari mengalami, belajar dari apa yang mereka lihat, dan dengan menggunakan kekuatan akal, pikiran dan hati, manusia kemudian menjadi paham, mengerti dan memahami. Pendidikan menjadikan semua potensi manusia

16 Dep.Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 275

berkembang dengan baik.

Kebutuhan manusia terhadap pendidikan merupakan kebutuhan asasi dalam rangka mempersiapkan setiap insan sampai pada suatu tingkat di mana mereka mampu menunjukkan kemandirian yang bertanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, pendidikan melatih manusia untuk memiliki tingkat penyesuaian diri yang baik dalam berinteraksi dengan lingkungan (baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam). John S.Brubacher, mengemukakan: bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian diri secara timbal balik dari seseorang dengan manusia lainnya dan dengan lingkungannya.¹⁹

Dari ungkapan Brubacher, jelas bahwa dengan adanya penyesuaian-penyesuaian tersebut akan membawa manusia kepada terbentuknya suatu kemampuan dan peningkatan kapasitas individual yang secara perlahan menunjukkan adanya perubahan-perubahan. Dalam konteks pendidikan, perubahan-perubahan tersebut merupakan proses yang terjadi pada potensi yang telah ada, untuk selanjutnya menjadi nyata, berkembang dan menjadi lebih baik.

Nativisme berpandangan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor hereditas (pembawaan).²⁰ Emperisme

17 Lihat: John S.Brubacher, *Modern Philosophies of Education*, 4th edition (New Delhi, Tata Mc Grow Hill Publishing Company Ltd., 1981), h. 371

18 Fatah Yasin, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 57.

berpendapat sebaliknya, bahwa manusia itu lahir seperti kertas putih yang kosong, pembawaan tidak berpengaruh apapun terhadap seseorang, yang memberi pengaruh adalah lingkungan di mana anak tersebut tumbuh dan besar.²¹ Teori konvergensi kemudian memadukan dua aliran sebelumnya, bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungannya.²²

Aliran konvergensi walaupun memadukan dua aliran; empirisme dan nativisme, tetapi konsep Islam jauh lebih sempurna. Ini juga merupakan kritik terhadap paham konvergensi tentang perkembangan manusia. Dalam Islam, faktor pembawaan tidak hanya bersifat genetika, tetapi semua potensi baik diletakkan di dalam dirinya oleh Allah. Inilah yang disebut dengan *fitrah*. Fitrah bukan bawaan dari orang tua sebagaimana konsep nativisme, tetapi fitrah adalah anugerah Ilahi yang diberikan kepada manusia. Fitrah itulah yang kemudian dikembangkan oleh pendidikan melalui beragam lingkungan pendidikan, dengan tiga alat utama, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati.

Instrumen penting berupa pendengaran, penglihatan dan hati yang diberikan oleh Allah swt menjadi alat bagi setiap insan untuk membuka wawasan dan cakrawalanya tentang dunia yang dinamis. Kenyataan hidup manusia menunjukkan bahwa manusia mengalami kehidupan yang dinamis. Dinamika kehidupan tersebut tercermin dari upaya manusia untuk hidup lebih baik dari waktu ke waktu. Mengapa demikian, tidak lain karena kemampuan manusia yang

19 Muh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam, Cet.1. (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 61. Lihat juga: Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 59.

20 Mujamil Qomar, Epistemologi Pendidikan Islam, Dari Metodologi Rasional, hingga Metode Kritik, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 259. Lihat juga: Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 60.

dianugerahkan oleh Allah Swt., sebagai makhluk yang sempurna. Kebudayaan dan peradaban yang berkembang adalah buah dari dinamika kehidupan manusia serta menjadi bukti bahwa manusia memiliki keunggulan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya.

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa pendidikan merupakan anasir penting dalam kehidupan manusia yang secara substansial mempengaruhi seluruh kehidupannya. Suatu kenyataan yang membuktikan bahwa pendidikan adalah instrumen utama bagi pembangunan kehidupan umat manusia dengan berbagai hasil yang telah diraihinya. Adalah sebuah keniscayaan membayangkan bahwa peradaban umat manusia dapat dibangun tanpa pendidikan.

Dapat ditegaskan bahwa dinamika kehidupan manusia adalah buah dari proses pendidikan yang terjadi secara semesta, dan saling berkontribusi di antara sesama umat manusia.

Pendidikan sebagai Ilmu

Sejarah lahirnya pendidikan sebagai satu cabang ilmu yang berdiri sendiri, persisnya tidak diketahui. Namun menurut Jusuf A.Faisal, dalam Fatah Yasin bahwa kehadiran ilmu pendidikan adalah masih tergolong ilmu yang relatif muda.²³ Walau tergolong muda, ilmu pendidikan menjadi cabang ilmu yang demikian penting, karena menyangkut kelanjutan kehidupan umat manusia.

Urgensi dari pembahasan ini adalah bagaimana mendudukan pendidikan dalam kerangka ilmu pengetahuan, untuk selanjutnya dibahas, dikritisi dan dikembangkan. Hal ini menjadi penting, tiada lain adalah untuk mengembangkan pendidikan itu sendiri.

21 A.Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam, (Malang:UIN-Malang Press, 2008), h.3

Istilah Ilmu pendidikan sering disebut sebagai terjemahan dari bahasa Yunani *paedagogues*, yang berarti pemuda yang bertugas untuk mengantar anak ke sekolah serta menjaga agar ia bertingkah laku susila dan disiplin. Dari istilah inilah kemudian dikembangkan menjadi istilah-istilah lain dalam pendidikan, seperti pendidik (*pedagog*), mendidik (*pedagogi*), dan kemudia melahirkan ilmu pendidikan (*paedagogiek*).²⁴

Hal ini kemudian membawa pada perlunya suatu refleksi (pemikiran) ilmiah tentang pendidikan sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan mendidik dan dididik.²⁵ Sebagai satu cabang ilmu yang beridri sendiri, maka ilmu pendidikan kemudian berkembang dengan mengikuti metodologi tertentu. Tenlain, mengemukakan pendapat tentang dua hal pokok yang menjadi pertanggungjawaban ilmu pendidikan:

1. *Objek formal* dari Ilmu pendidikan adalah gejala insani yang disebut pendidikan, atau proses (situasi) pendidikan.
2. *Metode Ilmiah* dari Ilmu pendidikan adalah keadaan nyata yang dilakukan, dialami manusia, dan harus dipahami oleh manusia. Untuk sampai kepada pemahaman tersebut dibutuhkan cara menganalisis tertentu (metode tertentu).

Objek formal ilmu pendidikan tiada lain adalah suasana, proses, atau situasi pendidikan yang selalu beriringan dengan kehidupan manusia. Karena itu, di awal telah dikemukakan bahwa pendidikan yang *inhern* dengan kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan pendidikan sebagai ilmu

22 Wens Tenlain, dkk., *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 5

23 *Ibid.*, h.7

hanya dapat dikaji dan dikembangkan melalui metode ilmiah, dan cara berpikir ilmiah.

Berpikir ilmiah menekankan pada bagaimana di dalamnya terjadi proses perenungan dan elaborasi yang mendalam terhadap interaksi manusia yang berlangsung di dalam proses pendidikan tersebut. Menurut Tanlain, perenungan tersebut menggunakan cara berpikir induktif, dan hasilnya disusun secara teratur, logis dan sistematis, sehingga menampakkan suatu penjelasan atau deskripsi mengenai pendidikan.²⁶

Carter V. Good, sebagaimana dikutip Fatah Yasin, menjelaskan bahwa ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan obyektif dari proses belajar, dan juga menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesa-hipotesa pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk instrumen.²⁷

Pendidikan sebagai satu cabang ilmu menjadi ilmu pendidikan, menjadikan ilmu tersebut senantiasa mengalami perkembangan, khususnya dalam hal aktivitas pemikiran ilmiah seputar pendidikan. Menurut Yasin, pemikiran ilmiah ini bersifat kritis, metodologis, dan sistematis. Pemikiran kritis artinya suatu pernyataan atau konsep harus memiliki dasar yang kuat. Pemikiran ilmiah yang bersifat metodologis menekankan pada suatu proses pemikiran dan penyelidikan yang menggunakan cara-cara dan metode tertentu, dan pemikiran yang bersifat sistematis maksudnya bahwa suatu pemikiran ilmiah dalam prosesnya harus dijiwai oleh ide yang tersusun secara berurutan dan menyatu sesuai dengan kerangka paradigmatic.

24 Ibid, h.7

25 Ibid. h.4

Pendidikan di Era Global

Global menurut Prof. Mastuhu, secara sederhana dapat disebut sebagai “mendunia”. Artinya, sistem, kehidupan internasional, lintas bangsa, negara, agama dan budaya. Implikasinya pun begitu luas memasuki semua aspek kehidupan, baik dalam kelompok sosial, suku, keluarga, dan bahkan individu.²⁸ Gejala globalisasi ditandai oleh semakin mudarnya sekat-sekat antar bangsa, komunikasi dan informasi yang demikian cepat, dan pertukaran informasi dan lintas budaya yang terjadi sedemikian rupa, sehingga setiap orang dari berbagai kalangan dapat saling mengakses dengan mudah. Selain pengaruh positif, globalisasi juga menyisakan jejak-jejak pengaruh negatif yang cukup kompleks.

Pembicaraan pendidikan dalam perspektif global menyisakan satu pertanyaan mendasar. Sejauhmana pendidikan mampu membawa pesan-pesan positif bagi kesejahteraan umat manusia? Dalam beberapa hal, kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan di beberapa negara dipengaruhi oleh banyak faktor, ideologi negara, agama dan kondisi lokal di mana pendidikan itu berlangsung.

Mungkin agak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh prof. Suyanto bahwa fenomena yang selalu terjadi dalam dunia pendidikan di era global ialah selalu tertinggalnya perkembangan dunia pendidikan itu sendiri jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi, informasi dan dunia bisnis yang mengiringinya.²⁹ Jika pendidikan yang dimaksud adalah dunia sekolah, boleh jadi hal

26 Mastuhu, Sistem Pendidikan Nasional Visioner, Cet.1, (Jakarta: Lentera Hati,2007), h. 9

27 Suyanto, Dinamika Pendidikan Nasional dalam Percaturan Dunia Global, cet.1,(Jakarta: PSAP-Muhammdiyah, 2006), h.5

terebut benar. Tetapi adalah hal yang kontradiktif jika perkembangan teknologi, informasi dan bisnis dipisahkan dari pembahasan tentang kemajuan pendidikan. Bukankan para pelaku di bidang teknologi, informasi dan bisnis merupakan bagian dari “produk” pendidikan?

Menurut penulis, yang terjadi dalam dunia pendidikan di era global, adalah terjadinya ketidakutuhan muatan pendidikan, atau pendidikan yang berjalan secara pincang. Para pelaku pendidikan hanya mengejar sisi materialismenya. Akibatnya kemajuan-kemajuan yang diperoleh dalam pendidikan hanya berimbas kepada aspek-aspek yang bersifat materialsime pula. Lahirlah perdaban modern yang menghasilkan manusia-manusia materialis, terampil di dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, menguasai teknologi informasi dan dunia usaha, tetapi kering dari nilai-nilai spiritual yang menjadi misi utama pendidikan. Begitu banyak orang pintar secara intelektual, tetapi tidak memiliki kecerdasan secara emosional dan spiritual. Pendidikan yang pincang seperti inilah yang melahirkan para koruptor.

Sangat setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Prof.Suyanto bahwa pembangunan pendidikan tidak selalu dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator rugi-laba, tetapi membiayai dan membangun sektor pendidikan harus dijadikan sebagai upaya yang memiliki jiwa dan visi *human investment* yang hasilnya baru akan diraih satu generasi berikutnya.³⁰

Dewasa ini, pengelolaan lembaga pendidikan cenderung terjadi *business oriented*. Pembukaan lembaga pendidikan sekolah selalu didasarkan pada animo, kebutuhan pasar dan peluang kerja.

28 Ibid., h. 5

Di Kalangan perguruan tinggi agama Islam –misalnya- beberapa fakultasnya cenderung “tidak diminati”, karena tidak menjanjikan “masa depan”. Sebuah ironi, bahwa lembaga pendidikan hanya bertumpu pada penciptaan peluang lapangan kerja, bukan pada bagaimana membangun mental bangsa yang bermartabat. Keberhasilan pendidikanpun selalu diukur dengan parameter-parameter ekonomi, dan daya saing global. Yang menimpa pendidikan di era global adalah terjadinya disorientasi arah dan tujuan pendidikan.

BAGIAN 3

Faktor - Faktor Determinan dalam Pendidikan

Sebagaimana telah dipahami bahwa setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki obyek kajiannya masing-masing. Selain metode dan sistem, adanya obyek dari ilmu menjadi syarat untuk disebut sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Demikian halnya dengan ilmu pendidikan yang menjadikan manusia sebagai obyek pembahasannya.

Pada bab sebelumnya telah disinggung bahwa pendidikan adalah usaha mengembangkan potensi-potensi baik (*fitrah*) menuju terwujudnya insan paripurna.

Sebagai suatu usaha, maka di dalam upaya dan proses pelaksanaan pendidikan tersebut, terdapat beberapa elemen pokok atau elemen dasar, yang membentuk satu kesatuan yang saling terkait dalam menopang pelaksanaan pendidikan, sehingga pendidikan berjalan secara terarah, teratur dan sistematis. Elemen-elemen tersebut biasa dikenal dengan istilah faktor-faktor determinan.

Ada banyak faktor yang berperan di dalam proses dan pelaksanaan pendidikan, namun faktor determinan yang dimaksud merupakan faktor dasar yang urgen, penting dan menjadi penentu proses pendidikan. Jika salah satu dari faktor tersebut mengalami disfungsi, maka kegiatan pendidikan tidak akan berjalan dengan semestinya.

Diagram berikut dapat menunjukkan visualisasi faktor-faktor determinan dalam pendidikan:



Gambar 1. Faktor-faktor determinan dalam pendidikan

Faktor-faktor determinan dalam pendidikan meliputi:

- ✘ Faktor Tujuan pendidikan
- ✘ Faktor Pendidik
- ✘ Faktor Peserta didik
- ✘ Faktor Lingkungan Pendidikan
- ✘ Faktor Alat pendidikan

Tujuan Pendidikan

Sebagaimana lazimnya suatu usaha atau kegiatan, maka pendidikan sebagai suatu usaha tentu memiliki tujuan sebagai target yang akan dicapai.

Merumuskan tujuan pendidikan berarti merencanakan suatu target atau sasaran yang akan dicapai setelah kegiatan pendidikan itu berlangsung. Dengan demikian, rujukan pendidikan merupakan visi pendidikan yang ditetapkan sebelumnya. Rumusan tujuan pendidikan biasanya dipengaruhi oleh latar belakang tertentu, baik dalam kaitannya dengan negara, ideologi, agama, maupun latar belakang kehidupan sosial masyarakat.

Merumuskan tujuan pendidikan harus dinyatakan secara jelas dan tegas sehingga setiap orang yang terlibat dalam usaha-usaha pendidikan memahami dengan baik arah pendidikan yang akan dituju. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan biasanya ditetapkan secara tertulis, walaupun substansi dan isinya seringkali lebih bersifat abstrak.

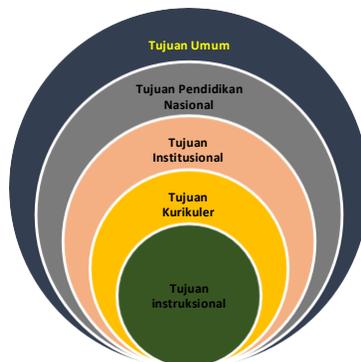
Pelaksanaan pendidikan di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dalam mukaddimah Undang-undang Dasar 1945, jelas termaktub, satu tujuan yaitu: "Mencerdaskan kehidupan bangsa...".

"Mencerdaskan kehidupan bangsa", merupakan suatu ungkapan yang padat dengan makna filosofis. Suatu rumusan tujuan yang tidak hanya menjangkau aspek-aspek lahiriah, tetapi juga meliputi seluruh aspek batiniah dan ranah-ranah lain yang terkait dengan seluruh kehidupan manusia. Nilai-nilai tujuan pendidikan biasanya bersumber dan dirumuskan dari unsur-unsur yang hidup dan

berkembang di dalam masyarakat.

Untuk memudahkan penjabaran tujuan pendidikan sehingga dapat tercapai secara konkrit dalam praktik-praktik pendidikan, maka rumusan tujuan pendidikan disusun secara hirarkis dari rumusan yang paling umum dan global menjadi rumusan yang lebih konkrit dan operasional.

Secara visual, tujuan pendidikan dapat dilihat dalam bagan hirarki tujuan pendidikan, mulai dari tujuan yang tertinggi dan mencakup tujuan secara luas, hingga tujuan yang lebih konkrit dan operasional, sebagai berikut:



Gambar 2. Hirarki Tujuan Pendidikan

Dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah:

Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara

yang demokratis dan bertanggungjawab.³¹

Gambaran tujuan pendidikan nasional dari rumusan di atas, merupakan gambaran manusia Indonesia seutuhnya yang menjadi cita-cita tertinggi. Menurut Hasbullah, ciri-ciri dari manusia Indonesia seutuhnya adalah:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Berbudi pekerti luhur
- c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Kepribadian yang mantap dan mandiri
- f. Bertanggungjawab terhadap masyarakat dan bangsa³²

Tujuan pendidikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian menjadi acuan bagi penjabaran tujuan pendidikan yang ada pada tingkat di bawahnya, hingga mencapai level tujuan paling rendah.

Macam-macam Tujuan Pendidikan

Berikut akan dikemukakan pembagian dan hirarki tujuan pendidikan:

1. Tujuan umum;

Rumusan tujuan umum pendidikan merupakan rumusan tujuan pendidikan yang bersifat luas dan mencakup seluruh hakekat kemanusiaan secara universal. Tujuan umum pendidikan biasanya dirumuskan dengan memperhatikan aspek-aspek yang

29 Anwar Arifin, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional, cet.ke-2 (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam Dep.Agama RI.,2003), h. 37.

30 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, cet.3,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h.11.

bersifat universal.

2. Tujuan Khusus;

Tujuan khusus pendidikan merupakan penjabaran yang bersifat detail dari rumusan tujuan umum pendidikan. Tujuan khusus biasanya ditentukan karena adanya faktor-faktor lain sehingga tujuan pendidikan yang akan dicapai menjadi bersifat khusus pula. Misalnya perbedaan lingkungan sosial masyarakat, perbedaan institusi lembaga pendidikan, atau bahkan perbedaan adat istiadat yang bersifat lokal.

Dalam hubungannya dengan hirarki tujuan pendidikan nasional di Indonesia, maka tujuan pendidikan dapat diurutkan sebagai berikut secara hirarkis:

1. Tujuan Nasional;

Menurut Hasbullah, tujuan nasional mencakup rumusan kualifikasi umum yang diharapkan dimiliki oleh setiap warga negara setelah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan nasional tertentu.³³ Rumusan tujuan pendidikan nasional umumnya dirumuskan dan ditetapkan dalam suatu Undang-undang, yang sekarang dikenal dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional.

2. Tujuan Institusional;

Tujuan institusional merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional pada tingkat institusi atau lembaga. Oleh karena itu, rumusan tujuan institusional menyesuaikan dengan karakteristik tujuan lembaga di mana pendidikan itu berlangsung.

31 *ibid.*, h 15.

3. Tujuan Kurikuler;

Tujuan kurikuler adalah penjabaran dari tujuan institusional, yang berisi tentang muatan-muatan tujuan yang akan dicapai setelah suatu program pengajaran selesai dilaksanakan dalam suatu bidang/mata pelajaran tertentu.

4. Tujuan Instruksional;

Tujuan instruksional, merupakan tujuan yang harus dicapai setiap proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Trend pembelajaran terkini menghendaki agar setiap siswa setiap suatu sesi pembelajaran selesai, maka mereka mencapai suatu kompetensi yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, tujuan instruksional, lebih bersifat operasional dapat dapat diukur dan dinilai secara otentik.

Faktor Pendidik

Pendidik adalah komponen yang sangat penting dalam pendidikan, karena ia akan mengantarkan anak didik kepada tujuan yang telah ditentukan.³⁴ Lalu, siapakah pendidik itu?

Menurut Ahmad D.Marimba, pendidik adalah orang yang memikul pertanggungjawaban pendidikan.³⁵ Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap orang dewasa dalam masyarakat dapat menjadi pendidik, sebab pendidikan merupakan suatu perbuatan sosial, perbuatan fundamental yang menyangkut keutuhan perkembangan pribadi anak didik menuju *pribadi dewasa susila*.

Di dalam masyarakat, orang yang berpribadi dewasa susila mempunyai pula tanggung jawab tertentu terhadap orang lain,

32 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 172

33 Ahmad D.Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 37

terhadap orang yang belum dewasa, entah karena status kodratinya atau karena status sosialnya di dalam masyarakat itu.

Untuk menjadi seorang pendidik dibutuhkan sikap tanggung jawab, dedikasi dan semangat yang tinggi, ditambah dengan keterampilan untuk mendidik dalam mengawal peserta didik mencapai kemandirian. Orang yang tidak memiliki dedikasi, tanggung jawab, dan keterampilan mendidik yang baik, kemudian disertai tugas dan tanggung jawab mendidik, akan membawa pendidikan menuju kehancuran.

Menurut Dwi Nugroho Hidayanto, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan itu meliputi:

- a. Orang dewasa
- b. Orang tua
- c. Guru
- d. Pemimpin masyarakat
- e. Pemimpin agama³⁶

Secara garis besar, pendidik dapat dikelompokkan kepada tiga yaitu: orang tua, guru, dan tokoh masyarakat (pemimpin). Ketiga unsur pendidik tersebut bertanggung jawab terhadap pendidikan dimana mereka berada.

Orang tua

Orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Dari orang tualah kemudian anak-anak mengenal lingkungan, dan orang tualah yang memperkenalkan pergaulan kepada anak-anaknya.

34 Dwi Nugroho Hidayanto, *Mengenal Manusia dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 43

Oleh karena itu, menjadi orang tua memiliki konsekuensi terhadap tanggung jawab pendidikan atas anak-anak yang lahir dari mereka. Dengan kata lain, pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua.

Orang tua yang terdiri dari ibu dan bapak, merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan dalam keluarga. Oleh karena itu, pendidikan dalam keluarga menjadi tanggung jawab para orang tua. Zuhairini mengemukakan bahwa

Pendidikan dalam keluarga adalah merupakan pendidikan yang sangat penting, karena keluarga pusat pendidikan yang pertama dan paling utama. Bahkan keluarga merupakan peletak dasar pembentukan pribadi anak.³⁷

Kelansungan masa depan anak banyak ditentukan oleh lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis. Dewasa ini, fenomena keluarga yang tidak harmonis menjadi pemandangan hidup yang mudah ditemukan, khususnya di kalangan masyarakat kota. Orang tua (ayah dan ibu) yang sibuk dengan berbagai kegiatan di luar rumah, menjadikan anak kehilangan rasa kasih sayang. Akibatnya anak akan mencari kasih sayang itu dengan caranya sendiri.

Zuhairini, mengutip pendapat Isaac Leon Kendel dalam bukunya *The New Era of Education: a Comparative Study*, telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa: pada akhir-akhir ini telah terjadi gejala dimana-mana yang menunjukkan bahwa watak keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama semakin berkurang fungsinya, karena disebabkan antara lain:

1. Emansipasi wanita dan masuknya mereka ke dalam berbagai lapangan kerja, dan memperoleh penghasilan sendiri dan meninggalkan fungsinya dalam keluarga.
2. Semakin kendornya penerapan norma-norma agama dan norma-norma sosial dalam kehidupan sehari-hari.
3. Keluarga pada umumnya menjadi kecil, karena adanya pembatasan kelahiran (*Birth Kontrol*), keluarga berencana dan lain-lain.³⁸

35 Muhammad In'am Esha dan Helmi Syaifuddin (ed.), *Himpunan Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Malang*, (Malang: UIN Malang Press, 2006), h. 74.

36 Ibid, h. 76.

Penelitian Kendell di atas, menunjukkan bahwa kontrol keluarga terhadap anggota keluarga cenderung menjadi berkurang seiring dengan kesibukan para orang tua terhadap anggota-anggota keluarganya.

Fenomena masyarakat modern yang sibuk dalam berbagai kegiatan (bisnis dan karir) telah membawa dampak pada melemahnya nilai-nilai ikatan keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga hanya diukur dengan nilai-nilai materi, yang akan berujung pada kehancuran sendi-sendi kehidupan rumah tangga.

Keprihatinan atas semakin melemahnya peran keluarga terhadap pendidikan anak, tentu menjadi tanggung jawab semua pihak di dalam melakukan perbaikan. Dengan kata lain dibutuhkan tekad untuk melakukan revitalisasi terhadap fungsi keluarga dalam mengawal perkembangan dan kehidupan anak di masa yang akan datang.

Dalam konteks pendidikan Islam, keberadaan pendidikan orang tua dalam keluarga dilihat sebagai sarana dan media tempat harapan keselamatan nasib manusia dan keyakinannya.

Kewajiban mendidik anak dan menetapkan peranan pendidikan keluarga dengan dasar keagamaan dan moral. Orang tua sebagai penanggung jawab keluarga merupakan unsur yang paling menentukan selamat atau tidaknya, baik atau buruknya kehidupan anak di dunia terlebih di akhirat.

Kemampuan yang dimiliki orang tua merupakan salah satu faktor penunjang dalam pendidikan anak. Karena itu, orang tua menjadi pendidik yang pertama dan utama dalam membentuk keyakinan anak didik

Pembentukan kepribadian anak sepatutnya dimulai dari kedua

orang tuanya, dalam lingkungan keluarga, kemudian secara lebih luas danberkesinambungan berkembang melalui lingkungan sosial di manaanak tersebut berada, sehingga tindakan atau perilaku yang baik, yang diperoleh dari orang tuanya dapat memberi kesan bahwa perilaku tersebut berlaku bukan saja dalam lingkungan rumah tangganya, melainkan berlaku di mana anak itu berinteraksi dengan masyarakat.

Salah satu bentuk kesalahpahaman dari beberapa orang tua dalam hal pendidikan anak adalah adanya anggapan bahwa “hanya” sekolah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, sehingga orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak-anaknya kepada guru di sekolah tanpa perlu lagi berkomunikasi. Anggapan seperti tentu saja keliru, sebab pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga adalah pendidikan yang bersifat asasi. Karena itu, orang tua adalah pendidik pertama, utama, dan kodrati.⁴⁰

37 Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthy, *al-Jami' al-Shagir*, juz I, (T.tp., tp. T.th.), h. 94.

38 Hasbullah, *op. cit.*, h.21

Guru

Menurut Abdurrahman, guru adalah seorang anggota masyarakat yang kompeten (cakap, mampu dan wewenang) dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan atau pemerintah untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peranan serta tanggung jawab guru, baik dalam lembaga pendidikan jalur sekolah, maupun lembaga luar sekolah.⁴¹

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang mudah dan gampang, tetapi dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang memadai sehingga dapat menjadi guru profesional. Bahkan keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh kemampuan dasar yang dimiliki oleh guru.⁴²

Tugas guru tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga bertindak sebagai pendidik bagi para peserta didiknya. Sebagai seorang pendidik, seorang guru sebaiknya memenuhi sifat-sifat khusus dalam melaksanakan tugas mendidik, yaitu:

1. Kematangan diri yang stabil; memahami diri, mencintai diri secara wajar dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai itu, sehingga ia bertanggung jawab sendiri terhadap hidupnya.
2. Kematangan sosial yang stabil; mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masyarakatnya, dan kecakapan membina kerjasama dengan orang lain
3. Kematangan profesional (kemampuan mendidik); menaruh perhatian dan rasa cinta terhadap anak didik, mempunyai

39 Abdurrahman, *Pengelolaan Pengajaran*, cet.5, (Ujung Pandang: CV.Bintang Selatang, 1994), h.57

40 Tarsa, *Basic Kompetensi Guru*, (Jakarta: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI., 2003), h.5

pengetahuan yang cukup tentang latar belakang anak didik dan perkembangannya, memiliki kecakapan dalam menggunakan cara-cara mendidik.

Tiga kematangan di atas, menunjukkan bahwa seorang guru tidak cukup jika hanya melengkapi diri dengan keterampilan dan kemampuan mendidik semata, tetapi dibutuhkan keterampilan lain yang melengkapi keterampilan mendidik yang ada ada dirinya.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, bab XI, pasal 39 ayat 2, ditegaskan bahwa:

Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.⁴³

Dengan demikian, jelas bahwa tugas guru merupakan tugas yang sangat kompleks, menantang dan membutuhkan tanggung jawab yang besar.

Seperti telah dikemukakan bahwa keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh kemampuan dasar yang dimiliki oleh guru. Oleh karena itu, seorang guru minimal harus memiliki empat rumpun kemampuan dasar sebagai berikut:

- a. Penguasaan bidang studi atau mata pelajaran
- b. Pemahaman terhadap peserta didik
- c. Penguasaan pembelajaran yang mendidik
- d. Kepribadian yang kuat dan sikap profesionalisme

41 Anwar Arifin, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang SISDIKNAS, (Jakarta: Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), h. 5

Permasalahan yang terkait dengan masalah guru di Indonesia adalah masalah sumber daya guru yang masih jauh dari harapan. Oleh Asyumardi Azra disebutkan sebagai masih banyaknya guru yang salah kamar (*mismatch*), kualitas keilmuan yang tidak memadai (*unqualified atau underqualified*). Data yang ditunjukkan Asyumardi Azra, menyebut bahwa khusus untuk guru madrasah, hanya sekitar 20% yang “layak” (*qualified*), dan 60 % yang belum layak (*unqualified atau underqualified*)⁴⁴.

Data di atas tentu sangat mencengangkan, mengingat bahwa kurang dari seperempat jumlah guru madrasah, tidak layak untuk menjadi seorang guru. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu solusi yang komprehensif untuk menyelesaikan persoalan kualitas guru.

Terbitnya undang-undang guru dan dosen setidaknya memberikan angin segar bagi kondisi guru dewasa ini dan di masa datang. Kesejahteraan guru yang mulai mendapat perhatian pemerintah tentu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kompetensi keguruan. Abdurrahman mengemukakan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok keguruan, guru harus memiliki seperangkat komoetensi yaitu:

1. Penguasaan terhadap materi bidang studi yang akan diajarkan.
2. Pemahaman dan keterampilan mengelola kelas
3. Pemahaman dan kemampuan mengelola program pengajaran, PBM dan sumber-sumber belajar.
4. Keterampilan memilih, menyusun dan menggunakan berbagai

42 Asyumardi Azra, Masalah Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah, Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan tahun 2002, yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta bekerjasama dengan Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia, tanggal 8 s/d 10 agustus 2002.

media pembelajaran.

5. Kemampuan dan keterampilan memilih dan menggunakan model-model mengajar, strategi-strategi mengajar, dan metode mengajar yang bervariasi.
6. Kemampuan dan keterampilan menerapkan prinsip-prinsip pengukuran dan penilaian.
7. Pengetahuan, pemahaman dan kemampuan menerapkan sistem-sistem instruksional dalam PBM.
8. Pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan keterampilan menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah.⁴⁵

Sebagai seorang tenaga profesional, maka untuk melaksanakan tugas-tugas profesional, guru diwajibkan memiliki seperangkat kemampuan dasar profesional. Kemampuan dasar profesional ini diperoleh dari inisiatif atau kreativitas guru untuk mengembangkan terus kemampuannya melalui belajar menadiri atau melalui pengalaman mengajarnya sendiri ataupun orang lain.

Selain itu, guru sebaiknya rajin untuk melakukan penelitian tindakan kelas sebagai wujud upaya memahami berbagai kesulitan sekaligus mencoba mencari solusi dari berbagai persoalan belajar mengajar yang dihadapinya di kelas. Di masa lalu, guru yang aktif melakukan penelitian tindakan kelas sangat jarang dijumpai.

43 Abdurrahman, op. cit., h. 64.

Faktor Peserta Didik

Peserta didik dalam pengertian umum adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit ialah anak (pribadi yang belum dewasa) yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik.⁴⁶

Aliran *Child centered* mengatakan bahwa pusat dari segala usaha pendidikan adalah pada anak didik atau peserta didik. Satu hal yang pasti bahwa pendidikan selalu melibatkan peserta didik, karena usaha pendidikan tiada lain adalah usaha terhadap peserta didik.

Oleh karena pendidikan merupakan usaha untuk membina dan mengembangkan potensi fitrah peserta didik, maka ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh seorang pendidik dalam kaitannya dengan peserta didik; salah satu di antaranya adalah memahami psikologi dan psikologi perkembangan. Pemahaman terhadap cabang ilmu jika akan membantu para pendidik untuk memahami peserta didik.

Seperti telah diketahui bahwa setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun di balik keragaman tersebut, terdapat sifat-sifat umum pada diri peserta didik.

Dalam pandangan psikologi, terdapat sifat-sifat umum dari peserta didik, sehingga setiap peserta didik umumnya mengikuti pola perkembangan yang hampir sama. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dunia anak merupakan dunia yang khas dan unik yang berbeda dengan dunia orang dewasa. J.J.Rousseau, mengemukakan

44 Sutari Imam Barnadib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis, (Yogyakarta:FIP-IKIP Yogyakarta, 1986), h.39.

bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa, oleh karena itu, perlakuan, tindakan dan cara menghadapi anak-anak berbeda dengan cara menghadapi orang dewasa.

2. Setiap individu mengikuti fase perkembangan tertentu, di mana setiap fase memiliki ciri –ciri umum perkembangannya sendiri-sendiri.
3. Setiap individu memiliki pola perembangannya sendiri-sendiri. Walaupun dia mengikuti fase perkembangan umum, tetapi memiliki tempo dan irama yang berbeda.
4. Tiap individu akan melalui fase-fase tugas perkembangan masing-masing. Artinya setiap fase perkembangan terdapat tahapan-tahapan yang umumnya harus dilalui oleh setiap peserta didik.

Agar setiap peserta didik tumbuh dan berkembang dengan baik, maka mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang dapat menunjang perkembangan mereka. Baik yang bersifat fisik maupun psikis.

L.J. Cronbach mengemukakan kebutuhan anak didik sebagai berikut:

1. Kebutuhan afeksi (kasih sayang)
2. Kebutuhan diterima oleh orang tua
3. Kebutuhan untuk diterima oleh kawan kelompok sebaya
4. Kebutuhan independen
5. Kebutuhan harga diri.

Pemenuhan kebutuhan peserta didik akan mendorong baginya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menyelesaikan tugas-tugas pendidikan dengan baik pula.

Hadari Nawawi⁴⁷ mengemukakan; pendidikan harus memandang anak didik dalam suatu fakta bahwa:

- a. Setiap anak lahir dalam keadaan lemah dan tak berdaya. Setiap orang tua (sebagai penanggung jawab pendidikan anak) berkewajiban untuk menjaga dan melindungi setiap anak-anak yang lahir dari padanya, termasuk di dalamnya mendidik dan memberikan pelajaran yang positif, sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, berakhlak dan memiliki rasa tanggung jawab.
- b. Setiap anak lahir sebagai kanak-kanak yang belum dewasa. Artinya anak tidak dapat diperlakukan seperti layaknya orang dewasa.

Ungkapan Hadari tersebut mengindikasikan bahwa anak masih memerlukan bimbingan yang lebih besar dalam bentuk pendidikan yang memadai bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwanya ke arah yang lebih matang.

Anak didik sebagai anak yang belum dewasa, akan sangat banyak tergantung kepada pendidiknya, anak didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu, ia menyadari kemampuannya masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya. Kekurangan ini membawanya untuk mengadakan interaksi dengan pendidiknya dalam situasi pendidikan.

Interaksi yang terjadi antara anak didik dan pendidik menjadikan keduanya terlibat dalam kegiatan pendidikan. Karena itu, keduanya; pendidik dan anak didik merupakan subyek pendidikan. Mereka adalah pelaku-pelaku utama pendidikan.

45 Hadari Nawawi, Pendidikan dalam Islam, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1993), h. 114

Lingkungan Pendidikan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri individu.⁴⁸ Ngalim Purwanto, mengutip pendapat Sartain, mengemukakan bahwa lingkungan adalah segala yang meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau proses/perjalanan hidup⁴⁹. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lingkungan alam dan lingkungan social-budaya. Lingkungan pendidikan adalah suatu tempat dengan situasi dan kondisi sosial budaya yang ada dimana pergaulan pendidikan berlangsung.

Dimanapun seseorang berada dia tidak akan mungkin pernah terlepas dari lingkungannya. Di awal pembahasan pada bab terdahulu dikemukakan bahwa pendidikan merupakan bagian yang *inheren* dengan kehidupan. Itu berarti bahwa pendidikan pun tidak dapat dipisahkan dari situasi lingkungan. Dengan kata lain, pendidikan senantiasa berhubungan dengan lingkungan.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting menjadi perhatian para pendidik, karena disadari atau tidak, manusia senantiasa dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan pendidikan yang tepat, menjadikan pendidikan dapat berlangsung secara efektif.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses atau kegiatan pendidikan. Secara garis besar lingkungan pendidikan dapat dikelompokkan pada

46 Sunaryo, Psikologi, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran RGC, 2004), h. 11.

47 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 59.

tiga, oleh Ki Hajar Dewantara disebutnya dengan istilah tri pusat pendidikan.

Menurut Ki Hajar Dewantoro, Lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi pemuda (jika diperluas menjadi lingkungan sosial masyarakat).

Lingkungan Keluarga

Dalam arti sempit keluarga adalah unit sosial,⁵⁰ yang terdiri atas dua orang (suami-istri) atau lebih (ayah, ibu dan anak) berdasarkan ikatan pernikahan. Sedangkan dalam arti luas keluarga adalah unit social berdasarkan hubungan darah atau keturunan, yang terdiri atas beberapa keluarga dalam arti sempit.

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, baik menurut hukum syari'ah Islam, maupun menurut undang-undang negara.⁵¹

Urgensi lingkungan keluarga tidak hanya menjadi tempat berkumpul bagi anggota keluarga, tetapi di dalamnya terjadi interkasi yang lebih mendalam, dan menentukan perkembangan dan masa depan anggota keluarga, mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin.

Proses terbentuknya keluarga, merupakan awal bagi masa depan keluarga selanjutnya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bagaimana membentuk keluarga sehingga tercapai maksud yang diharapkan. Jangan sampai lingkungan keluarga hanya dimaksudkan untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan tujuan bagi terbentuknya keluarga itu sendiri.

Andreas Soeroso, Sosiologi, (Jakarta: Quadra, 2006), h. 23.

48 Mudjia Rahardjo (ed), Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan, Cet.2, (Malang: UIN Malang Press, 2006), h.154.

Memilih pasangan sebagai suami isteri untuk kemudian membentuk keluarga, tujuannya adalah terciptanya kedamaian, kasih sayang dan rasa tenteram bahagia di dalamnya.

Keluarga yang telah terbentuk dari pernikahan sah, yang terdiri dari seorang suami dan istri, akan membawa konskuensi akan lahirnya keturunan daipadanya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi anggota keluarga, dan menjadi tanggung jawab pemimpin keluarga, dalam hal ini kedua orang tua si anak, yaitu ibu dan bapak.

Di dalam keluarga, maka orang tua yang terdiri dari ayah, ibu atau orang yang disertai tanggung jawab dalam suatu keluarga memegang peranan yang sangat penting terhadap pendidikan anak-anak. Ayah

dan ibu memiliki tanggung jawab terhadap setiap aspek pendidikan anak-anaknya.

Namun demikian, Djumransyah, mengemukakan bahwa pada kebanyakan keluarga, seorang ibulah yang sebenarnya memegang peranan penting dan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak-anaknya, karena ibulah yang paling lama bergaul dengan anak-anaknya selama sehari semalam.⁵²

Adapun tanggung jawab seorang ayah terhadap pendidikan anak adalah memberikan pendidikan dan suri tauladan terhadap anak, karena perilaku anak banyak ditiru dan dilihat dari ayahnya.⁵³

Jika diamati lebih lanjut, maka gambaran fungsi dan tanggung jawab seorang ayah terhadap pendidikan anak-anaknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sumber kekuasaan di dalam keluarga
2. Penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia luar
3. Pemberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga
4. Pelindung terhadap ancaman dari luar
5. Hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan
6. Pendidik dalam segi-segi rasional.⁵⁴

Pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik dan kondusif dalam lingkungan keluarga, akan menjadikan anak anak tumbuh dan berkembang dengan baik di masa yang akan datang.

49 Djumransjah, op. cit., h. 85

50 Djumransyah, op. cit., h. 86

51 Ngalim Purwanto, op. cit., h.91

a. Jenis-Jenis keluarga

Menurut Kamanto Sunarto (1993:159-160) keluarga dapat dibedakan dalam berbagai macam bentuk, yaitu :

- 1) Berdasarkan keanggotaannya
- 2) Berdasarkan garis keturunannya
- 3) Berdasarkan pemegang kekuasaannya
- 4) Berdasarkan bentuk perkawinan
- 5) Berdasarkan status social ekonominya
- 6) Berdasarkan keutuhannya

b. Fungsi keluarga

Keluarga memiliki berbagai fungsi, antara lain fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi sosialisasi, fungsi rekreasi, fungsi orientasi.⁵⁵ Peter Murdock (Sudardja Adiwikarta, 1988:67) mengemukakan 4 fungsi keluarga yang bersifat universal yaitu :

- 1) Sebagai pranata yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan.
- 2) Mengembangkan keturunan
- 3) Melaksanakan pendidikan
- 4) Sebagai kesatuan ekonomi

c. Orang tua sebagai pengemban tanggung jawab pendidikan anak

Salah satu fungsi keluarga yang bersifat universal adalah melaksanakan pendidikan. Dalam hal ini orang tua adalah pengemban tanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya. Orang yang berperan sebagai pendidik bagi anak di dalam keluarga utamanya adalah ayah dan ibu.

52 T.Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h.5

- d. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang bersifat wajar atau informal.

Pendidikan di dalam keluarga dilaksanakan atas dasar tanggung jawab kodrati dan atas dasar kasih sayang yang secara naluriyah muncul pada diri orang tua. Sejak anaknya lahir orang tua sudah terpanggil untuk menolongnya, melindunginya, dan membantunya. Di dalam keluarga pelaksanaan pendidikan berlangsung tidak dengan cara-cara yang artificial, melainkan bersifat wajar.

- e. Keluarga sebagai peletak dasar pendidikan anak

Pendidikan yang dilakukan si dalam keluarga sejak anak masih kecil akan menjadi dasar bagi pendidikan dan kehidupannya di masa datang.⁵⁶ Hal ini sebagaimana dikemukakan M.I. Soelaeman (1985) bahwa : “pengalaman dan perlakuan yang didapat anak dari lingkungannya masih kecil dari keluarganya menggariskan semacam pola hidup bagi kehidupan selanjutnya.

- f. Tujuan dan isi pendidikan dalam keluarga.

Tujuan pendidikan dalam keluarga adalah agar anak menjadi pribadi yang mantab, beragama, bermoral, dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Adapun isi pendidikan dalam keluarga biasanya meliputi nilai agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.

- g. Fungsi pendidikan dalam keluarga

- 1) Sebagai peletak dasar pendidikan anak,⁵⁷
- 2) Sebagai persiapan kearah kehidupan anak dalam

53 Astrid S.Susanto, Masyarakat Indonesia Memasuki Abad ke-21, (Jakarta: Depdiknas, 1999), h. 12.

54 Sikun Pribadi, Mutiara-mutiara Pendidikan, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 47.

masyarakatnya.⁵⁸

h. Faktor-faktor yang menentukan kualitas pendidikan di dalam keluarga.

Jenis keluarga, gaya kepemimpinan orang tua, kedudukan anak dalam urutan keanggotaan keluarga, fasilitas yang ada dalam keluarga, hubungan keluarga dengan dunia luar, status social ekonomi orang tua, akan turut mempengaruhi perkembangan pribadi anak.

i. Karakteristik pendidikan di dalam keluarga

- 1) Pendidikan di dalam keluarga lebih menekankan pada pengembangan karakter
- 2) Peserta didiknya bersifat heterogen
- 3) Isi pendidikannya tidak terprogram secara formal/tidak ada kurikulum tertulis
- 4) Tidak berjenjang
- 5) Waktu pendidikan tidak terjadwal secara ketat, relative lama.
- 6) Cara pelaksanaan pendidikan bersifat wajar
- 7) Evaluasi pendidikan tidak sistematis dan incidental
- 8) Credentials tidak ada dan tidak penting.

Lingkungan Sekolah

Sekolah adalah lingkungan pendidikan yang utama setelah lingkungan keluarga. Sekolah adalah suatu organisasi atau wadah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan semua sumber daya secara selektif, efektif dan efisien karena adanya persamaan motif untuk membantu peserta didik mencapai kedewasaanya. Kesamaan motif itulah yang

55 Ibid.

mendorong terbentuknya wadah “sekolah”.⁵⁹

Bagaimanapun juga, pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, keberadaan sekolah merupakan penunjang utama pendidikan anak setelah pendidikan di lingkungan keluarga. Banyak aspek yang kemudian tidak dapat dipenuhi pendidikan di lingkungan keluarga, tetapi dapat dipenuhi melalui pendidikan sekolah, misalnya dalam hal pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dan ketampilan.

Keberadaan sekolah menjadi penting dalam rangka mempersiapkan para peserta didik menjadi manusia paripurna. Dengan demikian, sekolah bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya.

Mengingat pentingnya sekolah bagi perkembangan peserta didik, maka keberadaan sekolah perlu dikelola dengan baik, sehingga mencapai hasil yang maksimal.

Untuk memberikan pendidikan yang teratur, terencana, terpadu, dan berkesinambungan maka sekolah dikelompokkan dan disusun berdasarkan jenis dan jenjangnya.

Dengan demikian, sekolah mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu:

1. Diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hirarkis.
2. Usia peserta didik di setiap jenjang relatif homogen
3. Dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan program yang diikuti
4. Materi pendidikan lebih bersifat akademik dan umum
5. Menekankan pada mutu, sebagai wujud jaminan di masa datang.

56 Abdurrahman, op. cit., 39.

Sebagai lembaga pendidikan, maka di dalam sekolah terdapat struktur organisasi, yang menunjukkan adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Hal ini membawa kepada kebutuhan akan pengelolaan sekolah secara efektif.

Pengelolaan sekolah adalah semua upaya dan tindakan kepala sekolah memobilisasi dan memanfaatkan semua sumber daya sekolah secara optimal, selektif, efektif dan efisien yang memberi peluang terlaksananya proses belajar mengajar dan fungsi-fungsi sekolah lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran.

Sekolah adalah salah satu pranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan.⁶⁰

a. Komponen sekolah

Komponen sekolah antara lain terdiri atas :

- 1) tujuan pendidikan
- 2) Sumber daya manusia seperti guru/pendidik, murid/siswa, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, petugas kebersihan, dst.
- 3) kurikulum (isi pendidikan)
- 4) Media pendidikan dan teknologi pendidikan,
- 5) sarana, prasarana, dan fasilitas
- 6) pengelola sekolah

Tiga komponen utama sekolah yaitu :

- 1) peserta didik
- 2) guru
- 3) kurikulum

57 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi, (Jakarta: Grasindo, 2003), h. 279.

b. Fungsi pendidikan sekolah

- 1) Fungsi transmisi (konservasi) kebudayaan masyarakat
- 2) Fungsi sosialisasi (memilih dan mengajarkan peranan social)
- 3) Fungsi integrasi social
- 4) Fungsi mengembangkan kepribadian anak didik
- 5) fungsi mempersiapkan anak didik untuk suatu pekerjaan
- 6) Fungsi inovasi/mentransformasi masyarakat dan kebudayaannya.

c. Tujuan dan fungsi pendidikan sekolah

Secara umum sekolah memiliki tujuan pendidikan sejalan dengan fungsi-fungsi sekolah.⁶¹ Implikasinya, maka isi pendidikan di sekolah akan disesuaikan dengan jenjang dan jenis sekolah yang bersangkutan. Adapun tujuan dan isi pendidikan masing-masing sekolah tentunya telah terumuskan secara tertulis (formal) di dalam kurikulumnya.

1) Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal

Sekolah merupakan kesatuan kegiatan-kegiatan menyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh para petugas khusus dengan cara-cara terencana dan teratur menurut tatanan nilai dan norma yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

2) Formalitas sekola merembes ke dalam kurikulum dan pembelajaran

Formalitas sekolah berakar pada status para individu yang menjadi komponennya, serta system nilai dan norma

58 Prayitno, Dasar, Teori dan Praksis Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 2009)

yang serba resmi. Perlu kita sadari bahwa selanjutnya formalitas tersebut merembes ke dalam kurikulum dan cara-cara pembelajaran.

- 3) Karakteristik pendidikan di sekolah
 - a) Secara factual, pendidikan di sekolah lebih menekankan kepada pengembangan kemampuan intelektual.⁶²
 - b) Peserta didiknya bersifat homogen
 - c) Isi pendidiknya terprogram secara formal / kurikulumnya tertulis
 - d) Berjenjang dan berkesinambungan
 - e) Waktu pendidikan terjadwal secara ketat, relative lama.
 - f) Cara pelaksanaan pendidikan bersifat formal dan artificial
 - g) Evaluasi pendidikan dilaksanakan secara sistematis
 - h) Credentials ada dan penting.

Lingkungan Sosial Masyarakat

Sering tidak disadari bahwa lingkungan sosial masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan seorang. Bahkan lingkungan sosial masyarakat telah berkontribusi terhadap berbagai perubahan dan perilaku masyarakat.

Kenyataan tersebut di atas, membawa kepada suatu kesimpulan, bahwa lingkungan sosial masyarakat dapat menjadi wahana bagi upaya tercapainya perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam perspektif ini, dapat dikatakan bahwa lingkungan sosial dapat memerankan fungsi “pendidikan” bagi masyarakat. Karena

59 Doni Koesoema, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global

itu, peserta didik yang menjadi sasaran pendidikan tiada lain adalah warga masyarakat itu sendiri.

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berintegrasi secara terorganisasi, menempati daerah tertentu, dan mengikuti suatu cara hidup atau budaya tertentu. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan.

a. Fungsi masyarakat sebagai lingkungan pendidikan

Di dalam lingkungan masyarakat, anak akan memperoleh pengalaman tentang berbagai hal, antara lain berkenaan dengan lingkungan alamnya, seperti flora dan fauna. Di lingkungan masyarakat anak pun akan memperoleh pengaruh dari orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dari teman sebaya, maupun orang dewasa. Anak juga akan memperoleh pengaruh dari hasil karya masyarakat. Di dalam masyarakat anak belajar tentang nilai-nilai dan peranan-perana yang seharusnya mereka lakukan. Anak memperoleh pengalaman bergaul dengan teman-temannya di luar rumah dan di luar lingkungan Sekolah. Karena itu pendidikan anak dalam lingkungan masyarakat dapat berfungsi sebagai pelengkap, penambah, dan mungkin juga pengembang pendidikan di dalam keluarga dan sekolah, bahkan dapat berfungsi sebagai pengganti pendidikan di sekolah.

b. Tanggung jawab pendidikan di lingkungan masyarakat.

Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, pendidikan di lingkungan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama para orang dewasa yang ada di lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

c. Pendidikan informal dalam masyarakat

Pendidikan informal dalam masyarakat antara lain dapat berlangsung melalui adapt kebiasaan, pergaulan anak sebaya,

upacara adat, pergaulan di lingkungan kerja, permainan, pagelaran kesenian, dan bahkan percakapan biasa sehari-hari. Dalam konteks ini pendidikan merupakan pewaris social yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat.

d. Pendidikan nonformal di dalam masyarakat

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Pasal 1 ayat (12) UU RI No. 20 Tahun 2003).

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional.

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.

e. Karakteristik pendidikan di masyarakat.

- 1) Secara factual tujuan pendidikannya lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis
- 2) Peserta didiknya bersifat heterogen
- 3) Isi pendidikannya ada yang terprogram secara tertulis, ada pula yang tidak terprogram secara tidak tertulis.
- 4) Dapat berjenjang dan berkesinambungan dan dapat pula

tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan.

- 5) Waktu pendidikan terjadwal secara ketat atau tidak terjadwal, lama pendidikannya relative singkat
- 6) Cara pelaksanaan pendidikan mungkin bersifat artificial mungkin pula bersifat wajar.
- 7) Evaluasi pendidikan mungkin dilaksanakan secara sistematis dapat pula tidak sistematis
- 8) Credentials mungkin ada dan mungkin pula tidak ada.

Peran masyarakat di dalam pelaksanaan pendidikan merupakan hak dan kewajiban yang dijamin oleh undang-undang. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bab IV bagian ketiga pasal 8 dikemukakan: bahwa masuarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Kemudian pada pasal 9 dikemukakan bahwa: masuarakat berkewajiban memberikan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.⁶³

Ini berarti bahwa keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan pendidikan merupakan hal yang mutlak dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Menurut Hasbullah, terdapat beberapa peran dari masyarakat terhadap pendidikan, yang meliputi:

1. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah.
2. Masyarakat berperan serta dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat

60 Undang-undang RI. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Menyediakan berbagai sarana dan kebutuhan sekolah.
4. Masyarakat sebagai sumber pembelajaran atau laboratorium tempat belajar.⁶⁴

Alat Pendidikan

Setiap kegiatan pendidikan selalu menggunakan alat-alat pendidikan. Menurut Tenlain, alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan untuk tercapainya tujuan pendidikan.⁶⁵ Sedangkan Langeveld memberikan batasan, alat pendidikan sebagai suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.⁶⁶

Dari definisi di atas, dipahami bahwa alat pendidikan erat kaitannya dengan tindakan atau perbuatan mendidik. Dalam perspektif yang lebih dinamis dapat dikatakan bahwa alat merupakan instrumen yang membantu tercapainya tujuan pendidikan.

Menurut Siti Meichati, alat pendidikan terdiri dari: perbuatan mendidik yang bersifat piranti lunak dan benda-benda sebagai alat bantu pendidikan yang bersifat hardware.⁶⁷ Sedangkan tindakan pendidikan sebagai alat pendidikan dapat dilihat dalam dua sudut pandang:

1. Pengaruh tindakan terhadap tingkah laku peserta didik.
 - a. Yang bersifat positif mendorong anak didik untuk melakukan _____ serta meneruskan tingkah laku tertentu, seperti teladan,

61 Hasbullah, op.cit., h.100-101.

62 Wens Tenlain, op. cit., h.51.

63 Wens Tenlain, op. cit. h. 52.

64 Siti Meichati, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta:FIP-IKIP, 1976), h.85.

- perintah, pujian dan hadiah.
- b. Yang bersifat mengekang, mendorong anak didik untuk menjauhi serta menghentikan tingkah laku tertentu, seperti larangan, teguran, ancaman dan hukuman.
2. Akibat tindakan terhadap perasaan anak didik
- a. Mencegah atau mengarahkan, seperti perintah, teladan dan larangan.
 - b. Memperbaiki seperti teguran, ancaman dan hukuman.⁶⁸

Dalam penggunaan alat pendidikan, maka yang penting diperhatikan adalah pendidik yang menggunakan alat-alat pendidikan tersebut. Baik terkait dengan tujuan penggunaan, kemampuan menggunakan alat, serta sasaran dari alat pendidikan yang akan diterapkan. Oleh karena itu, memilih alat pendidikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Tujuan yang ingin dicapai
2. Orang yang akan menggunakan alat tersebut
3. Untuk siapa alat tersebut digunakan
4. Efektivitas penggunaan alat tersebut.

Hal lain yang harus dilihat dalam kaitannya dengan penggunaan alat pendidikan adalah penggunaan alat tersebut adalah berdasarkan pertimbangan berikut:

1. Alat tersebut sesuai atau cocok dengan pencapaian tujuan pendidikan

68 Ibid., h.53.

2. Pendidik memahami fungsi alat tersebut dan mampu menggunakannya
3. Anak didik mampu menggunakan alat tersebut sesuai dengan keadaan dirinya
4. Alat tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan dan tidak menimbulkan akibat sampingan yang merugikan anak didik.

BAGIAN 4

Landasan Pendidikan

Landasan Filosofis dalam Pendidikan

Dalam mempelajari pendidikan sebagai suatu teori, ada beberapa pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan filosofis, pendekatan religius, dan pendekatan ilmiah.

Pendekatan filosofis terhadap pendidikan adalah suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip filsafat. Pengetahuan atau teori pendidikan yang dihasilkan dengan pendekatan filsafat ini ialah “filsafat pendidikan”. Menurut *Henderson*: “Filsafat pendidikan adalah filsafat yang diterapkan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan”.

Seperti dipahami, tujuan pendidikan adalah bersumber dari tujuan hidup manusia. Demikian juga nilai menjadi pandangan hidup manusia. Nilai dan tujuan hidup memang merupakan fakta, tetapi pembahasannya tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan lainnya, melainkan perlu perenungan yang lebih mendalam.

Dalam hubungannya dengan pendidikan, pendidikan berhubungan langsung dengan tujuan hidup dan kehidupan individu maupun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan tidak dapat dipahami seluruhnya, tetapi memahami tujuan akhir, yang bersumber kepada tujuan serta pandangan hidup manusia.

Filsafat akan menelaah suatu realita dengan lebih luas, sesuai dengan ciri-ciri berfikir filsafat, yaitu: radikal, sistematis dan universal. Dengan pendekatan filosofis filsafat akan mencoba menjawab tiga pertanyaan pendidikan secara menyeluruh, yaitu: 1) apakah pendidikan itu, 2) apa yang seharusnya dicapai oleh pendidikan, 3) Dengan cara-cara bagaimana cita-cita pendidikan dapat dicapai. Jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut di atas akan sangat tergantung atau sangat ditentukan oleh filsafat atau pandangan hidup kita.

Dari deskripsi tersebut dapat dipahami bahwa filsafat sesungguhnya menjadi salah satu sarana bagi upaya-upaya pemecahan dan penemuan (inovasi) di bidang pendidikan.

Landasan Psikologis dalam Pendidikan

Kadaan anak yang tadinya belum dewasa hingga menjadi dewasa berarti mengalami perubahan, karena dibimbing, dan kegiatan bimbingan merupakan usaha atau kegiatan berinteraksi antara pendidik, anak didik dan lingkungan.

Perubahan tersebut adalah merupakan gejala yang timbul secara psikologis. Di dalam hubungan inilah kiranya pendidik harus mampu memahami perubahan yang terjadi pada diri individu, baik perkembangan maupun pertumbuhannya. Atas dasar itu pula pendidik perlu memahami landasan pendidikan dari sudut psikologis.

Dengan demikian, psikologi adalah salah satu landasan pokok dari pendidikan. Antara psikologi dengan pendidikan merupakan satu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Subyek dan obyek pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala psikologis dari manusia. Dengan demikian keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dalam proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan peranan psikologi menjadi sangat mutlak. Analisis psikologi akan membantu para pendidik memahami struktur psikologis anak didik dan kegiatan-kegiatannya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan secara efektif.

Bahkan Wens Tanlain, mengemukakan bahwa semakin umum tujuan pendidikan, maka semakin bersifat filosofis dan sosiologis. Sebaliknya semakin dekat dan semakin spesifik tujuan pendidikan, maka semakin bersifat analisa psikologis.

Di dalam praktek pendidikan, anak didik belajar dengan bimbingan. Kegiatan-kegiatan belajar tertentu yang dilakukan oleh anak didik untuk mencapai tujuan tertentu juga dengan bimbingan, tuntunan pendidik. Dengan demikian, anak didik dan pendidik mengetahui hasil kegiatan-kegiatannya itu.

Dalam konteks di atas, tujuan pendidikan yang bersifat umum (filosofis sosiologis) perlu dinyatakan secara jelas spesifik. Dengan analisis psikologis tentang tingkah laku manusia dan isi tingkah laku itu, pendidik dapat menetapkan dan merumuskan tujuan-tujuan pendidikan.

Jadi tujuan-tujuan pendidikan yang dinyatakan berdasarkan analisis psikologis memberi tuntunan bagi pendidik dan anak didik

tentang apa yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dan tentang kemajuan yang dicapai oleh anak didik.

Landasan Sosiologis dalam Pendidikan

Pendidikan berlangsung dalam pergaulan antara pendidik dengan anak didik. Dapatnya anak didik bergaul karena memang; baik pendidik maupun anak didik adalah merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu saling berintegrasi, saling tolong menolong, saling ingin maju, ingin berkumpul, ingin menyesuaikan diri, hidup dalam kebersamaan dan lain sebagainya.

Sifat sebagai makhluk sosial sudah dimiliki sejak bayi, dan tampaknya merupakan potensi yang dibawa sejaklahir. Bahwa manusia merupakan makhluk sosial karena beberapa faktor berikut:

- a. Sifat ketergantungan manusia dengan manusia lainnya
- b. Sifat adaptability dan intelegensi

Dengan demikian, manusia sebagai makhluk sosial, menjadikan sosiologi sebagai landasan bagi proses dan pelaksanaan pendidikan, karena memang karakteristik dasar manusia sebagai makhluk sosial akan berkembang dengan baik dan menghasilkan kebudayaan-kebudayaan yang bernilai serta peradaban tinggi melalui pendidikan.

Landasan Historis Pendidikan

Nilai-nilai historis yang kemudian dijadikan sebagai landasan/dasar historis (sejarah) pendidikan, memiliki makna bahwa peristiwa kemanusiaan yang terjadi di masa lampau penuh dengan informasi-onformasi yang mengandung kejadian-kejadian, model-model, konsep-konsep, teori-teori, praktik-praktik moral, cita-

cita, bentuk dan sebagainya. Informasi dari sebuah peristiwa di masa lampau tersebut, mengandung nilai muatan pendidikan yang dapat dicontoh dan dapat ditiru oleh generasi masa kini dan masa yang akan datang.

Landasan Kultural

Nilai budaya yang kemudian dijadikan sebagai landasan / dasar kultural pendidikan, mengandung pengertian bahwa pendidikan itu selalu mengacu dan dipengaruhi oleh perkembangan budaya manusia sepanjang hidupnya. Budaya masa lalu berbeda dengan budaya masa kini, dan berbeda pula dengan budaya masa depan.

Ini berarti bahwa kebudayaan merupakan salah satu pijakan di dalam pendidikan yang berpengaruh terhadap proses pendidikan yang berlangsung. Sebaliknya pendidikan itu sendiri akan menghasilkan kebudayaan-kebudayaan baru yang menyebabkan berkembangnya kebudayaan yang ada. Dengan demikian terjadi hubungan timbal balik, di mana kebudayaan menjadi landasan pendidikan dan pendidikan mengarahkan pada berkembangnya kebudayaan yang baru.

Inovasi Pendidikan

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin kompleks, maka tindakan inovasi pendidikan menjadi begitu urgen. Tidak dapat dibayangkan bahwa pendidikan sedemikian stagnan dan lamban di dalam merespon perubahan zaman. Oleh karena itu, para pakar pendidikan senantiasa mengembangkan beragam ide dan gagasan dalam upaya

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

Tujuan utama inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan di dalam efisiensi dan efektifitas sumber-sumber tenaga, uang sarana dan prasarana pendidikan, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Menurut Hasbullah⁶⁹, banyak hal yang menuntut dan mendesak bagi perlunya sebuah inovasi, di antaranya:

- a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Pertumbuhan Penduduk;
- c. Meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik;
- d. Menurunnya kualitas pendidikan;
- e. Kurangnya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang berlangsung;
- f. Belum mekarnya alat organisasi yang efektif.

Kenyataan tersebut di atas banyak disebabkan oleh rendahnya wawasan dan lemahnya kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya menyesuaikan dengan trend perkembangan yang sedang berlangsung. Tentu saja trend yang dimaksud adalah trend kemajuan positif di bidang pendidikan.

Salah satu persoalan pendidikan yang selama ini sering menjadi titik perhatian adalah persoalan kurikulum dan administrasi pendidikan. Perubahan dan pengembangan kurikulum dianggap sebagai salah satu titik krusial di dalam penanganan masalah-masalah pendidikan khususnya pendidikan formal. Tidak dapat dipungkiri,

69 Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.189.

bahwa sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, telah sekian kali pula dilakukan perubahan/penggantian kurikulum.

Landasan Psikologi dalam Pendidikan

Psikologi sebagai cabang ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan. Tingkah laku dalam pengertian ini, adalah tingkah laku yang mempunyai tujuan.⁷⁰ Psikologi menjelaskan berbagai aspek perkembangan individu, melakukan analisis dan menjelaskan berbagai gejala-gejala jiwa manusia. Sedangkan pendidikan mengembangkan berbagai potensi, yang secara luas melibatkan aspek fisik dan psikis pada manusia. Ini menunjukkan bahwa psikologi dan pendidikan merupakan satu hubungan yang sangat penting dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hubungan antara psikologi dan pendidikan kemudian melahirkan cabang ilmu baru yang dikenal dengan psikologi pendidikan.

Oleh karena itu, psikologi pendidikan kemudian memfokuskan diri dalam mengamati berbagai tingkah laku yang terkait dengan mendidik, belajar dan mengajar. George J Mouly, mengemukakan:

*To the extent that psychology is the science most directly concerned with the study of behavior, it must necessarily supply the major part of the scientific of foundation of educational practice. In fact, psychology can contribute to every aspect of educational practice through the clarification of the nature learner, of the larning process, and of the role of the teacher.*⁷¹

70 Alfinar Azis, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, Departemen Agama RI, 2003), h. 3

71 George J.Mouly, Psycology of Effective Teaching, New York, Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1973.

Pendapat Mouly di atas menjelaskan bahwa psikologi sangat membantu di dalam memahami struktur dan berbagai aspek psikologi dari para peserta didik sehingga proses pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif. Pandangan ini menegaskan arti penting psikologi dalam dunia pendidikan.

Dewasa ini, psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang vital dalam praktek pendidikan, mulai dari interaksi guru dan murid, pemilihan bahan dan metode mengajar yang tepat, memacu perkembangan fisik dan mental anak untuk mencapai tujuan pembelajaran dan lain-lain.

Kaitannya dengan pembelajaran, maka psikologi pendidikan sangat membantu kelancaran proses pembelajaran, di antaranya:

1. Membantu guru dalam membuat disain instruksional
2. Disain instruksional adalah suatu rancangan untuk melaksanakan proses belajar mengajar, yang berisi rancangan untuk menentukan isi materi, tujuan yang hendak dicapai, bagaimana proses, serta evaluasi yang tepat.
3. Membantu guru di dalam “memahami” anak didik

Pertumbuhan dan Perkembangan

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena salahsatu ciri utama kehidupan adalah terjadinya pertumbuhan dan perkembangan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli, namun diakui bahwa pertumbuhan adalah suatu perubahan yang menuju kearah yang lebih maju, lebih dewasa. para ahli yang menganut aliran asosiasi berpendapat, bahwa pertumbuhan pada

H. 3

dasarnya adalah proses asosiasi.

Pada proses asosiasi yang primer adalah bagian-bagian. Bagian-bagian yang ada lebih dahulu, sedangkan keseluruhan ada pada kemudian. Bagian-bagian ini terikat satu sama lain menjadi keseluruhan asosiasi. Dapat dirumuskan suatu pengertian tentang proses asosiasi yaitu terjadinya perubahan pada seseorang secara tahap demi tahap karena pengaruh timbal balik dari pengalaman atau empiri luar melalui pancaindra yang menimbulkan sensasi maupun pengalaman dalam mengenal keadaan batin sendiri yang menimbulkan sensasi.

Menurut aliran psikologi gestalt pertumbuhan adalah proses diferensiasi. Dalam proses diferensiasi yang pokok adalah keseluruhan sedang bagian-bagian hanya mempunyai arti sebagai bagian dari keseluruhan dalam hubungan fungsional dengan bagian-bagian yang lain. Jadi menurut proses ini keseluruhan yang lebih dahulu ada, baru kemudian menyusul bagian-bagiannya.

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan adalah proses perubahan secara perlahan-lahan pada manusia dalam mengenal suatu yang semula mengenal sesuatu secara keseluruhan baru kemudian mengenal bagian-bagian dari lingkungan yang ada.

Adapun perkembangan, menurut McLeod dalam Syah, bahwa pertumbuhan juga dapat berarti sebuah tahapan perkembangan (*Stage of development*).⁷²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah rentetan perubahan jasmani dan rohani manusia ke arah yang lebih maju dan sempurna.

72 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 40

Namun demikian, Hamalik mengemukakan pandangan bahwa pertumbuhan (*growth*) dapat dipandang sebagai pertambahan dalam ukuran badan, tetapi dalam literature pendidikan dan psikologi, istilah pertumbuhan meliputi kematangan, perkembangan dan belajar.⁷³

Selanjutnya, ditambahkan oleh Hamalik dalam Tohirin, bahwa perkembangan merupakan proses kreatif karena perkembangan itu meliputi proses organisasi dan reorganisasi, maka perkembangan merupakan proses kreatif dalam arti individu memilih aspek-aspek lingkungan dan terhadap lingkungan itu, ia harus memberikan respons.⁷⁴

Arti Penting Perkembangan Terhadap Proses Pembelajaran

Antara perkembangan dan belajar terdapat hubungan yang sangat erat. Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap anak berkembang karena belajar.⁷⁵

Dalam konteks belajar formal, antara proses perkembangan dengan proses belajar formal terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Proses pembelajaran senantiasa merujuk pada tingkat perkembangan siswa, sehingga terjadi kesesuaian antara perkembangan dan belajarnya. Bahkan dikatakan bahwa program pengajaran yang baik adalah program yang mampu memberikan dukungan kepada para siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka.

Pemahaman tentang proses perkembangan dan semua aspeknya

73 Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru, 1992)

74 Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Integrasi dan Kompetensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 38.

75 *Ibid.*, h. 50.

memberi banyak manfaat, di antaranya:

- a. Guru dapat secara tepat di dalam memberikan layanan bimbingan kepada para siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- b. Guru dapat mengambil langkah yang tepat di dalam mengantisipasi berbagai kesulitan belajar siswa
- c. Guru dapat menyesuaikan level pembelajaran yang sesuai terhadap para siswa-siswanya.

Jika para guru mampu memahami berbagai aspek perkembangan yang terjadi pada siswa, maka proses pembelajaran dapat dengan mudah dilaksanakan. Tujuan pembelajaran akan tercapai secara efektif dan efisien.

BAGIAN 5

Administrasi Pendidikan

Administrasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan sumber daya manusia. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka administrasi pendidikan merupakan "kegiatan yang ditujukan untuk mengoptimalkan (efektif dan efisien) pencapaian tujuan pendidikan melalui penataan berbagai sumber daya, manusia, kurikulum dan fasilitas"

Kegiatan administrasi pendidikan melibatkan banyak pihak seperti kepala sekolah, para pembina, pengawas, serta pejabat departemen pendidikan. Keterlibatan tersebut meliputi fungsi dan tugas masing. Semua unsur yang terlibat berkontribusi terhadap peningkatan dan pencapaian tujuan pendidikan. Boleh dikatakan bahwa semua unsur tersebut adalah bagian dari administrator pendidikan.

Dalam rangka peningkatan kinerja berbagai sumber daya dalam kegiatan administrasi pendidikan, maka administrator pendidikan perlu memperhatikan beberapa prinsip administrasi.

Menurut Burhanuddin, ada lima prinsip yang harus diperhatikan:

1. Prinsip efisiensi;
2. Prinsip pengelolaan;
3. Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan;
4. Prinsip kepemimpinan yang efektif;
5. Prinsip kerjasama.

Keberhasilan kegiatan administrasi pendidikan dalam jangka panjang dapat dilihat dari sejauh mana tujuan pendidikan dapat diwujudkan. Untuk mencapai hasil yang maksimal tersebut dibutuhkan tenaga administrator pendidikan yang handal dan bertanggung jawab. Dalam kaitan ini administrasi pendidikan berfungsi untuk mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan untuk menata sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif.

Secara garis besar komponen administrasi pendidikan dapat digolongkan menjadi:

1. Administrasi personil sekolah;
2. Administrasi kurikulum;
3. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan;
4. Administrasi siswa;
5. Administrasi sekolah dan masyarakat.

Istilah lain yang sering dikaitkan dengan administrasi pendidikan adalah administrasi sekolah. Istilah administrasi sekolah umumnya dipahami lebih sempit dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan mencakup semua unsur yang terlibat dalam berbagai

kegiatan pendidikan, sedangkan administrasi sekolah hanya meliputi tugas tata usaha sekolah.

Namun demikian, tidak berarti bahwa administrasi sekolah bukan sesuatu yang penting. Kegiatan administrasi sekolah sebagai bagian dari administrasi pendidikan justru memiliki peran yang sangat penting di sekolah. Dalam arti bahwa kegiatan administrasi sekolah merupakan ujung tombak kegiatan administrasi pendidikan secara keseluruhan.

Di dalam lingkungan sekolah terdapat berbagai unsur yang tiada lain adalah komponen-komponen kegiatan administrasi pendidikan. Ini berarti bahwa kegiatan administrasi sekolah tiada lain adalah pelaksanaan administrasi pendidikan secara langsung di lapangan pendidikan.

Administrasi Kurikulum

Jika merujuk pada pengertian administrasi secara sederhana sebagai kegiatan mengarahkan, maka istilah administrasi kurikulum menekankan pada upaya bagaimana mengarahkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dilaksanakan secara tepat dalam berbagai kegiatan pendidikan.

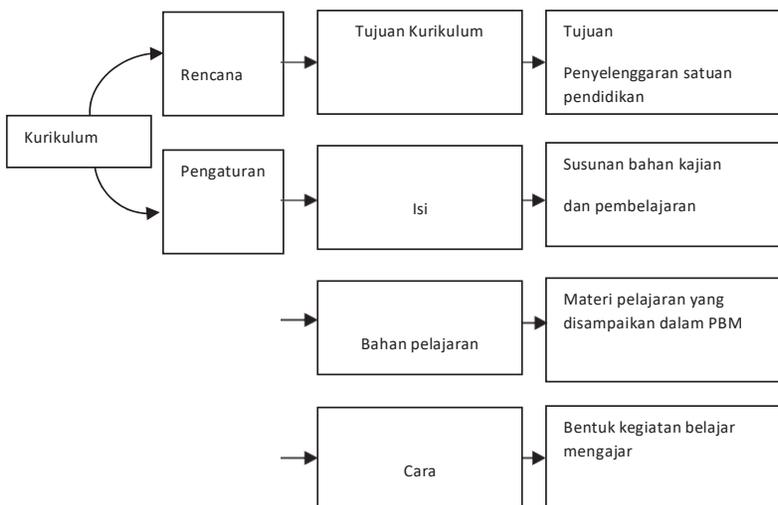
Seperti diketahui bahwa kurikulum mengandung rencana kegiatan yang akan dilakukan selama proses belajar mengajar. Dalam hal ini, kurikulum merupakan panduan dalam pengajaran. Menurut Ahmad (1997:59), kurikulum seharusnya tidak hanya sekedar berfungsi sebagai *guiding instruction*, tetapi kurikulum juga merupakan *anticipatory* yaitu sebagai instrumen dalam meramalkan keadaan masa datang. Dengan demikian, kurikulum memiliki peran sentral dalam mengarahkan capaian tujuan dan sasaran pendidikan.

Mengutip pendapat Nana Syaodih, (1997) bahwa dalam kaitannya dengan kurikulum, maka ada tiga konsep yang terkait dengan kurikulum:

1. Kurikulum merupakan inti pokok yang menjadi substansi kegiatan di sekolah. Kurikulum berisi perencanaan kegiatan belajar serta tujuan yang akan dicapai;
2. Kurikulum dipandang sebagai suatu sistem yang meliputi sistem sekolah, sistem pendidikan dan bahkan sistem masyarakat. Dalam hal ini, tercakup tata laksana perencanaan kurikulum, pelaksanaan serta evaluasi dan penyempurnaan kurikulum;
3. Kurikulum sebagai suatu studi yang dikaji oleh para ahli di bidang kurikulum. Dalam kaitan ini, para ahli kurikulum berupaya melakukan pengembangan dan inovasi di bidang kurikulum.

Dengan demikian, kegiatan dalam administrasi kurikulum tiada lain adalah berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi, kurikulum kemudian dikembangkan, sehingga dalam pelaksanaannya kurikulum dapat mencapai sasaran pendidikan yang diharapkan. Setidaknya, kegiatan administrasi kurikulum menghendaki agar rumusan kurikulum benar-benar berangkat dari kebutuhan akan sebuah instrumen yang terencana dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik pula.

Bagan berikut menunjukkan bahwa kegiatan administrasi dalam perumusan kurikulum akan mengarahkan para pelaksana kurikulum mencapai sasaran pendidikan dan pengajaran (Burhanuddin, 1998).



Gambar 1. Bagan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan nasional

Kurikulum dan Pembelajaran

Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua sisi dari satu mata uang. Artinya, dalam proses pendidikan, dua hal itu tidak dapat dipisahkan. Menurut Sanjaya, "kurikulum tidak akan berarti tanpa diimplementasikan dalam proses pembelajaran; sebaliknya pembelajaran tidak akan efektif tanpa didasarkan pada kurikulum sebagai pedoman."

Dalam tataran praktis, "apa yang akan dicapai sekolah, ditentukan oleh kurikulum sekolah itu" demikian pentingnya kurikulum, sehingga setiap guru wajib memahami dengan baik kurikulum dan seluk beluknya, karena guru merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Nasution (2004) menambahkan

bahwa hingga dalam batas-batas tertentu, guru bahkan dituntut menjadi pengembang kurikulum bagi kelasnya. Berikut akan dijelaskan beberapa aspek mendasar tentang kurikulum.

1. Pengertian kurikulum

Menurut Rosyadi istilah kurikulum baru dikenal dalam dunia pendidikan sejak kurang lebih satu abad yang lampau. Sedangkan Nasution (2004) menjelaskan, istilah kurikulum belum ditemukan dalam kamus Webster tahun 1812. Istilah tersebut baru muncul pertama kali pada kamus Webster edisi tahun 1856 (Nasution, 2005). Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai: *“1. a race course; a place for running; a chariot. 2. a course in general; applied particularly to the course of study in a university”*

Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin, *currere*, yang berarti lapangan perlombaan lari. Lapangan tersebut ada batas start dan ada batas finish. Dalam lapangan pendidikan, pengertian tersebut dijabarkan bahwa bahan belajar sudah ditentukan secara pasti, dari mana mulai diajarkan dan kapan diakhiri, dan bagaimana cara untuk menguasai bahan agar dapat mencapai gelar (Dakir, 2004).

Seiring dengan perkembangan pengetahuan di bidang pendidikan, maka istilah kurikulum pun mengalami perkembangan. Menurut Sanjaya (2005:2) *”kurikulum dapat dimaknai dalam tiga konteks, yaitu kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program belajar.”* Pendapat tersebut didukung oleh beberapa ahli yang sebelumnya telah berpendapat demikian.

Robert M.Hutchins (dalam Sanjaya, 2005:2), mengemukakan pengertian kurikulum sebagai mata dan isi pelajaran, dengan

mengemukakan bahwa: *“The curriculum should include grammar, reading, thetoric and logic and mathematic, and addition at the secondary level introduce the great books of the western world.”*

Lebih jauh, Sanjaya menjelaskan bahwa sebagai mata pelajaran yang harus dikuasai oleh anak didik, dalam proses perencanaannya kurikulum memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Perencanaan kurikulum biasanya menggunakan *judgment* ahli bidang studi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan faktor pendidikan, ahli tersebut menentukan mata pelajaran apa yang haruys diajarkan pada siswa.;
2. Dalam menentukan dan menyeleksi kurikulum perlu dipertimbangkan beberapa hal seperti tingkat kesulitan, minat siswa, urutan bahan pelajaran dan sebagainya;
3. Perencanaan dan impelemntasi kurikulum ditekankan pada penggunaan metode dan startegi pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat menguasai materi pelajaran, semacam menggunakan pendekatan ekspositori.

Pengertian lain bahwa kurikulum sebagai pengalaman, juga banyak dikemukakan dan didukung oleh beberapa ahli, di antaranya Hollis L.Caswell dan Doak S. Campbell , dengan mengemukakan bahwa: *“all of the experiencess children have under the guidance for teacher.”* Dorris Lee dan Murray Lee, mengemukakan bahwa *“...those the experiences of the child which the school in any way utilizes or attempts to influence.”*

Saylor dan Alexander (dalam Nasution, 2004:4) mengemukakan bahwa *“The curriculum is the sum total of school’s efforts to influence learning, whether in the classroom, on the playground, or out of school.”*

Hamalik mengemukakan bahwa “kurikulum adalah semua pengalaman yang dengan sengaja disediakan oleh sekolah bagi para siswanya untuk mencapai tujuan pendidikan.”

Adapun kurikulum sebagai rencana atau program belajar, juga banyak dikemukakan oleh ahli. Bahkan dewasa ini, pengertian kurikulum sebagai seperangkat rencana belajar menjadi trend pengertian kurikulum. Taba (dalam Sanjaya, 2005:5) mengemukakan bahwa: *“A curriculum is plan for learning: therefore, what is known about the learning process and the development of the individual has bearing on the shaping of a curriculum.”*

Nengly dan Evaras (dalam Dakir, 2004:5) mengemukakan bahwa kurikulum adalah “semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik.”

Dari berbagai pandangan tentang kurikulum di atas, pada prinsipnya semua dapat digunakan karena ketiga konsep pokok pengertian kurikulum pada dasarnya tertuang dalam keseluruhan proses yang dilakukan.

Namun demikian, kurikulum sebagai suatu rencana tampaknya sesuai dengan rumusan kurikulum menurut Undang-undang Sistem Pendidikan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003, Bab I pasal 1 ayat (19) disebutkan bahwa:

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai

tujuan pendidikan tertentu.

Dari pengertian tersebut, tergambar bahwa di dalam kurikulum, terdapat beberapa aspek yang harus sinkron, yaitu tujuan, isi, bahan pelajaran, serta metode yang secara keseluruhannya harus melalui proses perencanaan yang matang. Ini berarti bahwa keseluruhan proses pembelajaran dari awal hingga akhir harus dirancang secara baik, teratur dan sistematis.

Jika demikian, dapat dikatakan bahwa kurikulum pada dasarnya menjadi acuan/rencana aksi bagi keseluruhan proses pembelajaran sehingga proses tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain pengertian kurikulum seperti dikemukakan di atas, menurut Nasution tafsiran tentang kurikulum dapat pula ditinjau dari segi lain, sehingga diperoleh penggolongan sebagai berikut:

- a. Kurikulum dapat dilihat sebagai produk, yakni sebagai hasil karya para pengembang kurikulum, biasanya dalam suatu panitia. Hasilnya dituangkan dalam bentuk buku atau pedoman kurikulum, yang misalnya berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan;
- b. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai program, yakni alat yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Ini dapat berupa mengajarkan berbagai mata pelajaran tetapi dapat pula meliputi segala kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi perkembangan siswa misalnya perkumpulan sekolah, pertandingan, pramuka dan sebagainya;
- c. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari siswa, yakni pengetahuan, sikap, keterampilan

tertentu. Akan yang diharapkan dipelajari tidak selalu sama dengan apa yang benar-benar dipelajari;

- d. Kurikulum sebagai pengalaman siswa. Ketiga pandangan di atas berkenaan dengan perencanaan kurikulum sedangkan pandangan ini mengenai apa yang secara aktual menjadi kenyataan pada tiap siswa. Ada kemungkinan bahwa apa yang diwujudkan pada diri anak berbeda dengan apa yang diharapkan menurut rencana.

Banyaknya pengertian dan pandangan tentang kurikulum seharusnya tidak perlu dijadikan sebagai perdebatan. Perbedaan-perbedaan tersebut justru dapat dijadikan sebagai dorongan untuk mengadakan inovasi mencari bentuk-bentuk kurikulum yang lebih baik. Perbedaan tersebut juga menunjukkan dinamisasi pemikiran pendidikan yang dapat memperkaya wawasan dan penyempurnaan bagi kurikulum itu sendiri.

Fungsi kurikulum

Dalam pengalaman sehari-hari, sering didengarkan istilah fungsi. Fungsi membawa akibat pada adanya hasil. Jika sesuatu itu berfungsi maka berakibat pada adanya hasil.

Demikian juga sebaliknya, jika sesuatu itu tidak berfungsi akan berakibat pada tidak tercapainya hasil yang diharapkan (tujuan).

Atas dasar tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi kurikulum berkaitan dengan komponen-komponen yang ada dan mengarah pada tujuan-tujuan pendidikan. Menurut Dakir, beberapa komponen dalam kurikulum yang harus menunjukkan arah pada pencapaian tujuan pendidikan adalah: (1) perencanaan yang telah disusun, (2) komponen materi yang telah direncanakan,

(3) metode/cara yang telah dipilih, dan (4) penyelenggara pendidikan dalam fungsinya melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan pendidikan.

Secara ringkas, Ladjid mengemukakan tiga fungsi kurikulum, dengan berfokus pada tiga aspek:

1. Fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan tersebut, sebagai alat untuk mencapai seperangkat tujuan pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan sehari-hari;
2. Fungsi kurikulum bagi tataran tingkat sekolah, yaitu sebagai pemeliharaan proses pendidikan dan penyiapan tenaga kerja;
3. Fungsi bagi konsumen, yaitu sebagai keikutsertaan dalam memperlancar pelaksanaan program pendidikan dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan program yang serasi.

Selain itu, beberapa fungsi lain dari kurikulum tidak hanya menyangkut mereka yang berada di dalam lingkungan sekolah saja, tetapi fungsi-fungsi kurikulum juga menyangkut berbagai pihak di luar lingkungan sekolah, seperti para penulis buku ajar dan bahkan para masyarakat (*stakeholder*).

Bahkan sekarang ini, penyusunan kurikulum justru melibatkan berbagai lapisan (*stakeholder*) yang memang secara langsung atau tidak langsung akan turut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keberlakuan sebuah kurikulum.

a. Fungsi kurikulum bagi penyusun buku ajar

Bagi para penyusun buku ajar, memahami kurikulum merupakan keharusan, karena untuk dapat menyusun buku ajar yang sesuai dengan kehendak kurikulum maka cara satu-satunya adalah membaca

dan memahami kurikulum itu sendiri.

Para penulis buku ajar mestinya mempelajari terlebih dahulu kurikulum yang berlaku waktu itu. Untuk membuat berbagai pokok bahasan maupun sub pokok bahasan, hendaknya penulis buku ajar membuat analisis instruksional terlebih dahulu. Kemudian menyusun Garis-garis Besar Program Pelajaran (GBPP) untuk mata pelajaran tertentu, baru berbagai sumber bahan yang relevan.

Dengan menggunakan kurikulum yang berlaku sebagai pedoman, buku ajar yang disusun dapat mencapai target dan tujuan pembelajaran sebagaimana yang telah tertuang di dalam kurikulum. Buku ajar yang disusun dengan baik dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, akan menjadi pedoman bagi guru terhadap buku ajar yang digunakannya, sehingga tidak menimbulkan kerancuan terhadap bahan yang diajarkan.

b. Fungsi kurikulum bagi guru

Dapat dikatakan bahwa kurikulum bagi seorang guru diibaratkan sebagai kompas, yakni kurikulum adalah pedoman bagi guru dalam usaha kegiatan belajar mengajar. Seperti diketahui bahwa setiap proses pembelajaran memiliki target capaian berupa tujuan.

Dengan kata lain, tujuan pendidikan dan pengajaran telah harus diketahui oleh guru sebelum mengajar. Oleh karena itu sebelum mengajar, guru sudah harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk strategi yang tepat dari mata pelajaran yang akan disajikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Abdurrahman mengemukakan, "untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah ditetapkan, diperlukan adanya strategi belajar mengajar yang tepat."

Untuk itu harus dilakukan telaah, perkiraan dan perencanaan yang baik, dengan kata lain, pendidikan dan pengajaran harus dikelola dan direncanakan dengan baik.

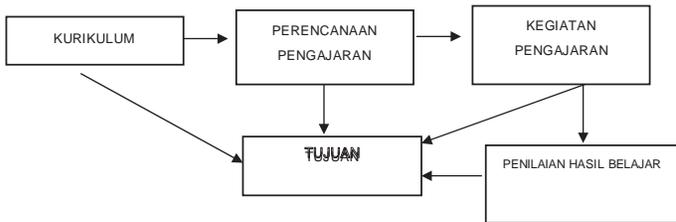
Namun bagi guru baru, diingatkan oleh Dakir (2004) bahwa sebelum mengajar pertama-tama yang perlu dipertanyakan adalah kurikulumnya. Setelah itu barulah Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan selanjutnya guru mencari berbagai sumber yang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkannya.

Secara keseluruhan, kurikulum dibutuhkan oleh guru sebagai pedoman, baik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran ataupun pada saat proses belajar mengajar, dan bahkan sesudah proses pembelajaran tersebut berlangsung.

Nurdin dan Usman (2002) mengemukakan bahwa salah satu tahapan mengajar yang harus dilalui oleh guru profesional adalah menyusun perencanaan pengajaran atau dengan kata lain disebut dengan mendesain program pengajaran. Setiap guru dituntut untuk mampu menyusun rencana pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Secara detail guru seharusnya telah memiliki tahapan yang jelas tentang kegiatan yang akan dilakukannya sepanjang dia berada di kelas. Hal ini tidak hanya membantu guru di dalam mengajar, tetapi juga akan membantu guru dalam mengelola kelas secara efektif dan efisien.

Dalam implementasi kurikulum atau pelaksanaan pengajaran, mendesain program pengajaran, melaksanakan proses belajar mengajar dan menilai hasil belajar siswa merupakan rangkaian kegiatan yang saling berurutan dan tak terpisah satu sama lainnya (terpadu).

Rangkaian kegiatan dari upaya penjabaran kurikulum, mulai dari perencanaan kemudian proses belajar mengajar sampai penilaian hasil belajar yang semuanya menuju pada upaya pencapaian tujuan merupakan satu kristalisasi yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 2. Kristalisasi kurikulum, perencanaan pengajaran, kegiatan pengajaran penilaian hasil belajar dan tujuan pembelajaran

Bagan di atas menggambarkan bagaimana fungsi kurikulum dalam mengarahkan kegiatan guru, mulai dari perencanaan, proses pembelajaran hingga penilaian hasil belajar yang secara keseluruhan setiap komponen bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran.

c. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah

Kepala sekolah adalah manajer di sekolah, dalam pengertian bahwa kepala sekolah melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, pengawasan dan lain sebagainya di sekolah yang dipimpinnya. Sekolah adalah salah satu bentuk organisasi, di mana di dalamnya terdapat manajemen. Kast dan Rosenzweig (1996:569) mengemukakan bahwa:

Manajemen merupakan kekuatan utama dalam organisasi untuk mengkoordinir sumber daya manusia dan material,

dan para manajer bertanggung jawab untuk pelaksanaan organisasionalnya, baik untuk hasil sekarang maupun untuk potensi masa datang.⁷⁶

Dalam kaitan kurikulum, kepala sekolah bertanggung jawab agar setiap guru yang berada di bawah pimpinannya tahu dan memahami setiap kurikulum yang sedang berlaku, dan untuk selanjutnya kepala sekolah bertindak untuk melakukan supervisi. Hamalik mengemukakan bahwa:

Supervisi adalah semua usaha yang dilakukan supervisor dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, pengarahan, motivasi, nasihat dan pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar.⁷⁷

Pengertian supervisi di atas, mengamanahkan kepada kepala sekolah bahwasanya kepala sekolah bertanggung jawab terhadap sosialisasi setiap kebijakan pendidikan dan pengajaran bahkan bertanggung jawab untuk terlaksananya kebijakan-kebijakan tersebut di tingkat sekolah. Hal inilah yang diingatkan oleh Komariah dan Triatna (2005) bahwa kepemimpinan pendidikan yang diperlukan saat ini adalah pemimpin yang memiliki sikap tanggap dan cepat dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan.

Melalui kurikulum kepala sekolah dapat melakukan tugas pembinaan kepada para guru sehingga akan diketahui berbagai kekurangan dan kelemahan proses yang sedang berlangsung.

76 Freemont E.Kazt dan James E. Rosenzweig , Organisasi dan Manajemen, Jilid 1, (Cet. Ke-4), Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 596

77 Dakir, op.cit., h. 16

d. Fungsi kurikulum bagi masyarakat

Fungsi kurikulum bagi masyarakat, sesungguhnya juga akan menggambarkan fungsi sekolah bagi masyarakat. Artinya, kurikulum akan menggambarkan berbagai muatan yang akan diemban oleh sekolah.

Ada anggapan masyarakat yang menganggap bahwa fungsi sekolah adalah menjadi inspirator dan menjadi motor penggerak (*agent of change*) bagi setiap perubahan (Nasution, 2004). Jika demikian, tentu akan sangat banyak yang diharapkan masyarakat dari sekolah. John Dewey (dalam Nasution, 2004) mengemukakan bahwa lembaga pendidikan sekolah adalah institusi yang paling efektif untuk melakukan rekonstruksi dan memperbaiki masyarakat melalui pendidikan individu. Bahkan G.S.Counts (dalam Nasution, 2004:157) lebih jauh dari itu; dengan mengemukakan bahwa "pendidikan tidak hanya harus membawa perubahan dalam masyarakat akan tetapi mengubah tata sosial dan mengatur perubahan sosial."

Jika demikian fungsi dan tugas yang diemban sekolah, maka hal itu sangat tergantung kepada kurikulum, karena kurikulum adalah pedoman dari semua kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kurikulum berperan sangat besar dalam mempercepat terjadinya proses perubahan sosial di dalam masyarakat. Teori sosiologi mengatakan bahwa: Setiap masyarakat manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan, Perubahan mana dapat berupa perubahan yang tidak menarik atau kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun amat luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali akan tetapi ada pula perubahan yang amat cepat (Soekanto, 1996). Ini pula yang menjadi salah satu alasan

mengapa kemudian kurikulum perlu dikembangkan atau bahkan mungkin diadakan perubahan. Hal itu semata-mata karena terjadinya dinamika dalam kehidupan sosial masyarakat.

Seiring dengan itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan di bidang teknologi ini telah mengakibatkan perubahan-perubahan yang sangat fantastis, drastis dan signifikan dalam kehidupan umat manusia di hampir segala aspek kehidupan (Bastian, 2002).

Membangun masyarakat melalui pendidikan adalah keharusan yang sangat mendesak dan tidak boleh ditawar-tawar. Bastian (2002:13) mengemukakan bahwa : "Bangsa yang tidak mampu untuk mengantisipasi perkembangan disebabkan kesalahan sistem pendidikannya yang tidak berorientasi pada pengembangan potensi pembawaan generasi mudanya secara maksimal." Sistem pendidikan sangat tergantung dari cara pandang suatu bangsa akan pengertian apa sebenarnya hakikat pendidikan tersebut.

Tujuan kurikulum

Tujuan adalah segala sesuatu yang ingin dicapai. Menurut Dakir (2004:21) bahwa "Segala sesuatu itu dapat berupa benda konkrit baik berupa barang maupun tempat, atau dapat juga berupa hal-hal yang sifatnya abstrak."

Secara umum tujuan kurikulum pada dasarnya sama dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ternyata berbeda-beda karena didasari pada setiap aliran atau konsep yang diyakini kebenarannya atau dari mana sudut pandangnya. Mungkin dari sudut hirarki, lembaga, daerah penyelenggara, jangka waktu arahlulusan dan sebagainya.

Roberts dan Kellough (dalam Sabda, 2005:64) mengemukakan tujuan umum kurikulum sebagai berikut:

1. *To teach student to be independent problem solvers;*
2. *To involve students indirect, purposeful and meaningful learning;*
3. *To assist student as they recognize that learning is integrated;*
4. *To assist student in following individual interest through individualized and personalized learning;*
5. *To design situations in which the students, what they need to know rather than what a particular curriculum indicates;*
6. *To encourage student to work with others in cooperative learning situations, such as partnerships and small groups of learning;*
7. *To emphasize the process of learning as whole and connected rather than as a series of specific and disparate skills.*

Tujuan-tujuan umum di atas harus dijadikan sebagai roh atau jiwa perumusan tujuan-tujuan dalam pengembangan kurikulum yang berada pada level di bawahnya (Sabda, 2006).

Maksud dari pernyataan Sabda tersebut, bahwa tujuan kurikulum yang tersusun secara hirarkis harus merupakan satu kristalisasi di mana setiap tujuan kurikulum pada level yang lebih rendah merupakan penjabaran dari tujuan kurikulum yang ada di atasnya.

Pengembangan Kurikulum

Istilah pengembangan kurikulum merupakan salah satu istilah yang memiliki makna yang beragam, di samping sering pula dirancukan dengan beberapa istilah lain yang hampir sama dan saling berkaitan, seperti *curriculum development*, *curriculum*

reconstruction, curriculum inovation, curriculum planning dan curriculum design.

Dilihat dari sisi etimologis, istilah pengembangan kurikulum sering dirujuk dari istilah bahasa inggris "*development curriculum*". Menurut Zais mengemukakan bahwa: "*Development curriculum adalah: a process that how curriculum construction will proceed.*" Dalam pengertian ini, terkadang *curriculum development* mempunyai makna yang sama dengan *curriculum construction*.⁷⁸

Namun Zais (dalam Sabda, 2006:50) lebih cenderung menggunakan istilah *curriculum engineering* (rekayasa kurikulum), karena menurutnya istilah itu lebih mencakup kegiatan lainnya. Ditambahkan oleh Zais (Dalam Sabda, 2006) "*Curriculum engineering adalah : the collective process of curriculum construction, development and implemntation.*"

Pertanyaan mendasar yang dapat diajukan adalah, mengapa kurikulum itu harus dikembangkan? Untuk membahas hal tersebut, ada baiknya memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum. Meminjam definisi yang dikemukakan oleh Ladjid (2005) bahwa istilah pengembangan menunjukkan pada kegiatan-kegiatan yang menghasilkan alat, sistem atau cara baru melalui langkah-langkah penyusunan, pelaksanaan dan penyempurnaan atas dasar penilaian yang dilakukan selama kegiatan pengembangan tersebut.

Dari definisi tersebut dipahami bahwa pengembangan kurikulum menghendaki agar kurikulum yang telah ada dapat disempurnakan sehingga menghasilkan kurikulum yang lebih baik secara kontinyu.

78 Syaifuddin Sabda, Desain Pengembangan Model Kurikulum Terpadu IPTEK dan IMTAQ, (Jakarta: Quantum Teaching, 1995) h. 49

Menurut Dakir (2004), ada tiga kegiatan yang satu dengan yang lain saling terkait, yaitu perencanaan, pembinaan, kemudian pengembangan, kembali lagi ke perencanaan yang lebih baik, dibina dan dikembangkan lagi, begitu seterusnya. Adapun pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan, karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datang dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum hendaknya bersifat antisipatif, adaptif, dan aplikatif.

Upaya mengembangkan kurikulum berangkat dari asumsi bahwa kurikulum sebagai buah karya manusia tentu memiliki banyak celah kelemahan. Karena itu, seiring dengan waktu yang berlalu, maka usaha penyempurnaan ke arah yang lebih baik menjadi satu tuntutan yang tidak dapat ditolak. Menurut Mulyasa (2006) bahwa upaya penyempurnaan kurikulum perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang memuaskan (*continoues quality improvement*), terutama dengan penerapan serta penjabaran standar isi dan standar kompetensi.

Lahirnya kurikulum 2006 yang begitu mepet dengan kurikulum 2004 memang dapat menimbulkan tanda tanya tentang kurikulum itu sendiri. Namun jika kembali kepada konsep dasar serta latar belakang pengembangan kurikulum itu sendiri, maka dapat dipahami bahwa lahirnya sebuah kurikulum baru, sebagai penyempurna dari kurikulum yang sudah ada tentu saja adalah hal yang wajar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang menjadi esensi dari sebuah kurikulum adalah apakah kurikulum tersebut dapat memenuhi target dan sasaran pendidikan yang telah direncanakan.

Langkah-langkah pengembangan kurikulum

Dari apa yang dikemukakan tentang urgensi pengembangan kurikulum tersebut, maka dapat dipahami bahwa untuk mengembangkan kurikulum dibutuhkan sebuah *team work* yang benar-benar padu dan memahami dengan baik persoalan pendidikan, baik secara makro maupun secara mikro. Hal ini penting agar langkah upaya yang dilakukan terhadap apa yang telah dikonseptualisasikan dalam rangka membuat kurikulum menjadi lebih baik dapat benar-benar terwujud.

Diingatkan oleh Suyanto (2006:20), bahwa "pemahaman terhadap apa yang dikonseptualisasikan, maka substansi penting yang perlu dijaga adalah jangan sampai terjadi proses simflikasi pemahaman terhadap kurikulum itu sendiri." Kalau sampai terjadi simflikasi terhadap kurikulum, kita akan terjebak pada kesalahan konsepsi dalam melakukan pengembangan kurikulum dan juga akan terjebak dalam pemahaman kurikulum yang sangat sempit. Miskonsepsi terhadap pengembangan kurikulum membawa konsekuensi terjadinya "malpraktik" pendidikan.

Jika konsepsi pengembangan kurikulum telah menemukan titik pijakan yang tepat, maka upaya pengembangan kurikulum akan berjalan dengan baik. Yang menjadi masalah kemudian, adalah memulai "pijakan" pengembangan itu sendiri seharusnya diawali dari mana?

Menurut Dakir (2004), pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan *link and match* antara *out put* dengan lapangan kerja yang diperlukan. Untuk mencapai harapan terlaksananya tidaklah mudah. Kita harus mengetahui *gap* antara *das sein* dengan *das sollen*,

antara kenyataan dengan harapan. Kita ingin biasanya bersifat sangat ideal padahal hal tersebut kadang sangat sulit dicapai. Untuk dapat mencapai harapan yang mampu dicapai itupun perlu adanya berbagai faktor yang mendukung dan program yang aplikabel.

Tyler (dalam Sabda, 2006:61) mengemukakan bahwa sebuah dokumen kurikulum minimal menggambarkan empat pertanyaan dasar, yaitu:

- (1) *What educational purpose should the school seek to attain?*
- (2) *What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes?*
- (3) *How can this educational experiences be effectively organized?*
- (4) *How can we determine wether theses purposes are being attained?*

Tidak jauh berbeda dengan tuntutan di atas, maurer (1994) mengemukakan enam unsur yang harus ada dalam sebuah desain kurikulum, yaitu: (1) tujuan umum (*common objective*), (2) tema umum (*common theme*), (3) kerangka waktu (*common time frame*), (4) pola sequen materi (*diverses secuenceing pattern*), (5) strategi aplikasi pembelajaran (*applied learning strategy*), dan (6) bentuk pengukuran (*varied assesment*).

R.G.Havelock (dalam Nasution, 1987:158-159) mengemukakan bahwa lingkup upaya perubahan dalam pendidikan termasuk di dalamnya perubahan kurikulum, dapat digolongkan dalam enam jenis:

1. *subtitusi*, penggantian atau penukaran, misalnya mengganti buku pelajaran yang lama dengan buku pelajaran yang baru, metode yang lama dengan metode yang baru. Dan sebagainya;

2. *Alterasi*, yaitu mengadakan perubahan dalam struktur yang ada;
3. *penambahan*, tanpa mengganggu pola yang lama, misalnya menambahkan alat audio visual baru;
4. *Restrukturisasi*, misalnya mengadakan reorganisasi kurikulum dan jadwal pelajaran yang dapat memerlukan perubahan yang mendalam tentang hubungan antar pribadi;
5. *Penghapusan cara-cara lam*;;
6. *Penguatan yang lama*.

Tahap-tahap pengembangan kurikulum

Menurut Ladjid (2005:15) ada tiga tahap pengembangan kurikulum; “tahap pengembangan tingkat lembaga, tahap pengembangan program setiap bidang studi dan tahap pengembangan program pengajaran di kelas.”

a. Tahap pengembangan tingkat lembaga

Kegiatan pengembangan tingkat lembaga yang harus diketahui adalah:

1. Perumusan tujuan intitusional; dalam merumuskan tujuan intitusional maka sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan sekurang-kurangnya ada tiga sumber penting, yaitu tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional, pandangan dan harapan masyarakat dan dunia kerja, harapan lembaga pendidikan yang lebih tinggi;
2. Menetapkan isi dan struktur program; di mana setelah setelah tujuan-tujuan institusional itu dirumuskan berdasarkan pada fungsi lembaga pendidikan, sumber dan penerapan ciri-

ciri penerapan tujuan intitusional tersebut, maka langkah berikutnya adalah menetapkan isi bidang study yang akan diajarkan;

3. Penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum; dalam penyusunan ini ada empat cakupan yang harus diperhatikan dengan seksama, yaitu: (1) pelaksanaan pengajaran, (2) pengadaan penilaian, (3) pengadaan bimbingan penyuluhan, dan (4) pelaksanaan adminsitrasi dan supervisi.

b. Tahap pengembangan setiap bidang studi

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan setiap program studi, meliputi:

1. Merumuskan tujuan kurikuler;
2. Merumuskan tujuan pengajaran;
3. Menetapkan pokok bahasan/subpokok bahasan;
4. Menyusun Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP);
5. Menyusun pedoman khusus.

3) Tahap pengembangan program pengajaran di kelas

Dalam mengembangkan program pengajaran di kelas, GBPP bidang studi yang ada harus dikaji dan diolah oleh para guru sehingga menjadi satuan-satuan bahan pelajaran yang akan disajikan kepada murid.

Satuan bahan adalah satuan konsep, pengertian atau masalah yang dapat disajikan kepada para murid dalam waktu dua sampai delapan jam pelajaran. Oleh karena itu, satuan bahan pelajaran dapat

berupa satu pokok bahan, bagian dari pokok bahasan dan mungkin terjadi gabungan dua atau lebih pokok bahasan yang ada dalam GBPP.

Implementasi Kurikulum Dalam Proses Pembelajaran

Pengertian implementasi kurikulum

Secara sederhana *implementasi* bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa."

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata *implementasi* bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, *implementasi* tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum.

Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum menurut Fullan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda.

Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman (2004) menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemosstrasikan metode pengajaran yang digunakan.

Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman (2002) menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap.

Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman (2002) memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum.

Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Implementasi kurikulum dan permasalahannya

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa implementasi kurikulum mengacu kepada adanya aksi atau tindakan dari para guru untuk melaksanakan kurikulum sebagai mana yang telah ada. Namun demikian, betapapun indah dan bagusnya rumusan tujuan atau cita-cita pendidikan/pengajaran yang sudah tertuang dalam kurikulum formal tetapi hal itu belkum memberi jaminan bahwa apa yang termuat di dalam kurikulum dapat teraktualisasikan di dalam proses belajar mengajar. Karena, aktualisasi dan penjabaran kurikulum di dalam proses belajar mengajar sangat ditentukan serta tergantung kepada seberapa besar peranan yang dimainkan oleh para guru (Danim, 2002)

Oleh karena itu, guru memegang peranan penting dalam implementasi kurikulum. Syaodih (dalam Nurdin dan Usman, 2002:68) bahwa:

Kurikulum nyata atau aktual kurikulum merupakan implementasi dari official kurikulum oleh guru di dalam kelas. Betapapaun bagusnya sebuah kurikulum, tetapi hasilnya sangat tergantung kepada apa yang dilakukan oleh guru dan juga peserta didik di dalam kelas.

Masalah yang sering menjadi perdebatan seputar kurikulum adalah persdoalan implementasi kurikulum yang “kadang-kadang” belum diketahui hasilnya namun telah diganti pula dengan kurikulum yang baru. Secara teknis dapat dikemukakan beberapa persoalan.

1. Kesiapan dan kemampuan guru memahami kehendak kurikulum baru;
2. Kesiapan perangkat/media dalam mendukung pelaksanaan kurikulum baru;
3. Sosialisasi kurikulum kepada masyarakat.

Berkenaan dengan persoalan yang dikemukakan di atas, maka semuanya akan sangat terpulung kepada fungsi dan peranan guru dan staf di sekolah, dalam upaya mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum sehingga benar-benar dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, sosialisasi terhadap kurikulum amat penting dilakukan dengan segera, untuk menghindari keterlambatan pemahaman yang berakibat pada keterlambatan penerapannya.

Standarisasi Pendidikan

Berkaitan dengan penerapan desentralisasi pendidikan, maka sudah menjadi keharusan kurikulum sekolah untuk diperbaharui guna mengurangi beban tersebut (Bastian, 2002). Beban yang dimaksud oleh Bastian, adalah konsekuensi logis dari kebijakan desentralisasi yang seiring dengan kebijakan otonomi daerah, di mana upaya pengembangan kurikulum menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sekolah bahkan guru.

Untuk itu, pemerintah sejak tahun 2005 telah melakukan proyeksi terhadap perubahan kurikulum yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan, dan untuk selanjutnya diiringi dengan keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor

22 Tahun 2006 tentang Standar isi dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tentang Standar Kompetensi dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Kepmen nomor 22 tahun 2006 dan Kepmen nomor 23 tahun 2006 tersebut.

Jika Menilik apa yang telah digariskan oleh pemerintah yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), sebagai kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka sekolah dituntut untuk lebih besar perannya dalam mengembangkan kurikulum.

Ketentuan tersebut tercermin pada delapan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006, tentang Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi:

1. Standar isi;
2. Standar proses;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
5. Standar sarana dan prasarana;
6. Standar pengelolaan;
7. Standar pembiayaan;
8. Standar penilaian pendidikan.

Delapan standar nasional pendidikan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Standar isi

Tentang standar isi, pengaturannya tertuang dalam Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2006, tentang Standar Isi. Dalam Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2006 tersebut, dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa:

Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Dalam buku Panduan Penyusunan Kurikulum 2013, jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, dijelaskan bahwa:

Termasuk dalam Standar Isi adalah : kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar Isi ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 22 Tahun 2006.

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Standar isi adalah

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik

pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Dari berbagai sumber tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam Standar Isi ada empat hal yang menjadi fokus, yaitu (1) kerangka dasar, (2) struktur kurikulum, (3) standar kompetensi, dan (4) kompetensi dasar.

Dalam penjabaran lebih jauh, Mulyasa (2006:24) menjelaskan bahwa standar isi adalah:

Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan/akademik.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum memuat tentang sejumlah mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan kelompok mata pelajaran. Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 7. Penting untuk diingat bahwa rumusan Standar Nasional Pendidikan yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNP) merupakan standar baku yang wajib diikuti.

2. Standar proses

Standar proses adalah "standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan" (Mulyasa, 2006:28).

Pengaturan dan ketentuan tentang standar proses, mencerminkan bahwa pemerintah menghendaki agar setiap jenjang dan satuan pendidikan, mengacu pada suatu proses yang standar sehingga antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya tidak terjadi kesenjangan yang cukup mencolok.

Selain itu, standar proses menuntun dan mengarahkan guru untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar secara terarah. Melalui standar proses, para guru dapat merencanakan proses yang akan dilakukannya sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien.

Manfaat lain dari standar proses adalah memudahkan untuk dilakukan evaluasi, karena adanya acuan standar proses yang akan dinilai dan dievaluasi. Para guru dan supervisor pendidikan akan terbantu dengan hal tersebut. Dengan demikian proses dan pelaksanaan pendidikan di sekolah dapat terpantau dengan mudah.

3. Standar kompetensi lulusan

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) disebutkan bahwa Standar kompetensi lulusan adalah "kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan." Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006, disebutkan bahwa

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni:

1. Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan: Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan

- untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut;
2. Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut;
 3. Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Dari peraturan menteri tersebut, tergambar sebuah keterpaduan tiga ranah (afeksi, kognisi dan psikomotorik) yang menjadi syarat pokok kompetensi lulusan setiap jenjang satuan pendidikan. Karakteristik setiap jenjang satuan pendidikan tegas dan terjabarkan antara jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah umum dan menengah kejuruan. Dengan demikian Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; Standar Kompetensi Lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Bastian (2002) mengemukakan bahwa salah satu agenda penting dalam membenahi kualitas dan profesionalisme tenaga kependidikan adalah pembenahan profesionalisme tenaga pengelola pendidikan. Lebih jauh dijelaskan bahwa kualitas infrastruktur lembaga pendidikan, khususnya infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan peserta didik memiliki urgensi yang sangat signifikan.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pasal 40 ayat (2) dijelaskan bahwa pendidik (guru) berkewajiban:

Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Suyanto (2006:121) menegaskan bahwa "jika guru tidak memiliki profesionalisme yang kuat, ia akan ketinggalan dan ditinggalkan oleh *stakeholder*-nya." Menjawab pertanyaan tentang aspek yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru sehingga layak disebut profesional, Suyanto (2006,122) menjelaskan: "Aspek profesionalisme yang penting untuk dimiliki guru antara lain mencakup persoalan kepemimpinan, keterampilan profesional untuk mewujudkan sekolah yang efektif, dan keterampilan profesional dalam proses pembelajaran."

Oleh karena itu, lahirnya kurikulum 2006 mengendaki agar kualitas tenaga pendidik ditetapkan dalam suatu standar yang jelas dan tegas. Mulyasa (2006:40) menjelaskan bahwa "standar pendidik dan tenaga kependidikan, merupakan ketentuan yang secara tegas menetapkan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan."

Jika melihat berbagai penjelasan di atas, tergambar bahwa seorang guru atau tenaga kependidikan, harus memiliki kompetensi yang jelas dan kesiapan lahir batin dalam mengemban tugas dan tanggung sebagai seorang guru.

5. Standar sarana dan prasarana

Menurut Mulyasa (2006:34), standar sarana dan prasarana adalah:

Kriteria minimal dari semua aspek yang terkait dengan pendukung kegiatan belajar mengajar di sekoah, yang meliputi ruang belajar, tempat olah raga, sarana ibadah, laboratorium, dan semua sumber lain yang terkait dengan usaha dan kegiatan belajar megajar.

Sarana dan prasarana pendidikan tentu saja menjadi hal mutlak bagi kelancarana penyelenggaraan proses belajar mengajar. Hanya aja dalam hal ini, pemerintah menetapkan suatu standar minimal yang menjadi kriteria setiap sekolah yang menyelenggarakan suatu kegiatan pendidikan.

6. Standar pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pngawasan kegiatan pendidikan, pada semua tingkat dan satuan pendidikan, guna efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan (Mulyasa, 2006).

Dalam kaitannya dengan standar pengelolaan, maka hal tersebut terkait dengan aspek manajerial yang berlngsung di sekolah. Dengan sendirinya masalah pengelolaan pendidikan berhubungan dengan masalah administrasi dan manajemen pendidikan di tingkat sekolah.

Lahirnya konsep Manajemen Berbasis Sekolah, yang didukung oleh kebijakan otonomi daerah, berimplikasi pada kewenangan yang besar bagi sekolah untuk mengelola dan mengembangkan sendiri Sumber daya yang ada pada tingkat satuan pendidikan. Karena itu, tantangan yang cukup besar ditawarkan oleh pemerintah dengan

dibakukannya standar pengelolaan sebagai rujukan bagi sekolah dalam mengembangkan dan mengelola sekolah masing-masing.

Konsekuensi yang kemudian timbul adalah, pihak sekolah dan *stakeholdernya* dituntut untuk menemukan formula pengelolaan yang tepat dengan cara mengembangkan suatu sistem manajerial yang tangguh sehingga dapat berkompetisi secara sehat dan tetap eksis sebagai sebuah lembaga pendidikan. Hal ini juga tidak terlepas dari ketatnya aturan pemerintah terhadap standar pengelolaan yang telah diatur dalam Badan Standar Nasional Pendidikan.

7. Standar pembiayaan

Menurut Mulyasa (2006:48), "standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama setahun."

Masalah biaya pendidikan memang masih menjadi salah satu faktor kendala pengelolaan pendidikan di tanah air. Karena itu, Suyanto (2006:61) mengemukakan bahwa "semangat otonomi daerah dengan pembaruan pendidikan yang mengarah pada pelibatan masyarakat secara luas mampu memahami bahwa pendidikan merupakan *human investment* penting yang harus dirancang dan dibiayai secara lebih memadai."

Hanya saja, standar pembiayaan yang diberlakukan seharusnya mampu mengakomodasi semua lapisan masyarakat, sehingga pendidikan benar-benar dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat, dalam artian pendidikan menjadi milik bagi semua kalangan.

8. Standar penilaian pendidikan

Penilaian dalam pendidikan adalah salah satu instrumen pokok

dalam mengukur tingkat keberhasilan proses belajar mengajar yang telah berlangsung. Hamalik (2003:213) menjelaskan bahwa "tujuan dari penilaian adalah untuk mengetahui bagaimana kemajuan belajar dari masing-masing peserta didik, selama mereka mengikuti program pendidikan."

Menurut Mulyasa (2006:49), "standar penilaian pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar nasional Pendidikan, terkait dengan masalah mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik."

Dari deskripsi tentang Kurikulum 2013 di atas, maka penerapan kurikulum 2013 mengisyaratkan dan menuntut sekolah, terutama bagi guru yang mampu untuk mengembangkan kurikulum sendiri dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi yang dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, bahkan mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh BSNP sesuai dengan visi, misi sekolah dan daerah masing-masing, sedangkan bagi lembaga yang belum siap mengembangkan kurikulumnya, dapat menggunakan model kurikulum dari BSNP (Mulyasa, 2006)

Hakekat kurikulum 2013 adalah kebebasan guru dalam mengembangkan kurikulum melalui Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD), sehingga kreatifitas guru semakin terbuka dan terakomodasi. Jika sebelumnya guru hanya mengajarkan materi yang sudah ditetapkan dalam kurikulum nasional yang dibuat pemerintah, maka dalam kurikulum baru tidak demikian.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum sekolah yang dikembangkan oleh guru, sehingga keinginan memberi ruang dan kebebasan kepada guru untuk

memilih yang terbaik bagi peserta didiknya dapat terakomodasi dengan baik. Bahkan dikatakan bahwa, kurikulum 2013 benar-benar memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada guru.

BAGIAN 6

Pendidikan di Indonesia

Tantangan terbesar pendidikan di era otonomi daerah adalah mewujudkan tata kelola dan mutu pendidikan yang berkualitas. Pengelolaan pendidikan di berbagai daerah tampaknya belum mampu mewujudkan tata kelola pendidikan yang berkualitas, baik dari segi manajemen pengelolaan lembaga pendidikan,⁷⁹ kualitas sumber daya manusia⁸⁰, maupun kebijakan.⁸¹ Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah mengusung reformasi di berbagai bidang termasuk reformasi birokrasi di bidang pendidikan.

Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk meminimalisir berbagai kendala dan mengefektifkan kinerja birokrasi di bidang pendidikan.

79 Yusuf Hakim, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Pendidikan Madrasah dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. V Nomor 1 Tahun 2008

80 M. Hidayat, Masalah Mutu Pendidikan di Era Otonomi Daerah, makalah dapat di akses di http://www.lpmpsulsel.net/v2/attachments/120_masalah%20mutu%20pendidikan_M.Hidayat.pdf, Akses tanggal 14 Januari 2015.

81 R. Gunawan Sudarmanto, Pembiayaan Pendidikan dan Otonomi Sekolah Dalam Menghadapi Globalisasi, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional tentang Globalisasi Pendidikan yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana FKIP Universitas Lampung, bertempat di Balai Keratun Jl. Wolter Monginsidi, Badnar Lampung tanggal 21 Juni 2010. Makalah dapat didownload di <http://staff.unila.ac.id/radengunawan/files/2011/09/Pembiayaan-Pendidikan-Otonomi-dan-Globalisasi.pdf>

Reformasi birokrasi melahirkan kebijakan otonomi daerah, dimaksudkan untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat, termasuk di bidang pendidikan.

Reformasi pendidikan seharusnya membawa pendidikan ke arah yang lebih baik. Kenyataannya kondisi pendidikan di Indonesia masih sangat terpuruk.⁸² Mencermati fenomena pendidikan di Indonesia, tampaknya ada yang keliru di dalam penataan sistem dan kebijakan pendidikan. Dalam konteks otonomi daerah, kekeliruan tersebut disebabkan oleh dua hal.

Pertama: pemerintah daerah tidak memiliki perencanaan yang matang terkait pengelolaan pendidikan di daerahnya. Pemerintah daerah tidak merencanakan program pendidikan dalam kerangka visi dan misi yang jelas, bahkan visi dan misi hanya sekadar slogan yang kenyataannya tidak ditemukan dalam pelaksanaan.

Kedua: lemahnya *political will* pemerintah daerah untuk mewujudkan pendidikan yang mencerahkan. Pemerintah daerah tidak kreatif di dalam mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat daerahnya. Dinas pendidikan hanya bertindak sebagai “pengawas sekolah”, tidak melakukan pembinaan pengelolaan pendidikan yang kreatif.

Kedua hal yang disebutkan di atas diperparah oleh praktik politik oligarki di lingkungan pemerintah daerah, karena kekuasaan berada di tangan sekelompok orang tertentu.

Politik oligarki menganggangi pikiran pemerintahan di daerah. Filosofi yang digunakan adalah filosofi penguasa yang cenderung mempertahankan kekuasaan dengan segala macam cara. Untuk

82 Data yang dirilis oleh The Learning Curve Pearson tahun 2014 menunjukkan posisi Indonesia di urutan ke-40 dari 40 negara yang terdata, suatu pemandangan yang memprihatinkan. Lihat: <http://thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking>, akses tanggal 8 Januari 2015

mempertahankan kekuasaan, mereka menempatkan orang-orang yang memungkinkan kekuasaannya bertahan. Tata kelola pemerintahan tidak berada di tangan orang berdasarkan profesionalitas yang mereka miliki.⁸³ Birokrasi diisi oleh orang-orang yang tidak tepat menangani pendidikan, akibatnya terasa pada praktik dan kebijakan pendidikan yang ada. Di tingkat legislatif, perhatian wakil rakyat terhadap pendidikan pun tidak banyak membantu, karena sebahagian dari sumber daya anggota legislatif masih sangat lemah.

Tujuan desentralisasi pendidikan yang dilaksanakan dewasa ini pun tidak tercapai.. Menurut Benny Susetyo dan Syaiful Arif, desentralisasi tanpa komitmen yang luas dan mendasar untuk mengubah pola penyelenggaraan pendidikan disebutnya masih setengah hati saja.⁸⁴ Hal yang sama dikemukakan oleh Mohammad Zen dan Muh. Arif Hadiwinata, bahwa desentralisasi di bidang pendidikan belum berjalan maksimal, bahkan berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas.⁸⁵ Banyak persoalan pendidikan tidak mampu ditangani dengan baik oleh Pemerintah Daerah, misalnya

83 Kebijakan otonomi daerah, memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun komposisi birokrasi di lingkungan pemerintahannya. Namun disayangkan, terkadang komposisi birokrasi disusun berdasarkan latar belakang kekerabatan, partai politik pendukung ketika pilkada, atau bahkan secara personal sebagai tim sukses pilkada. Pertimbangan profesionalisme dan kelayakan ditinggalkan. Lihat: Christian Von Luebke, *Democracy in Progress or Oligarchy in Disguise? The Politics of Decentralized Governance in Post-Soeharto Indonesia*, Discussion Paper Series, Department of International Economic Policy, University of Freiburg, 2012.

84 Benny Susetyo dan Syaiful Arif, *Politik Pendidikan Penguasa*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), h. 22

85 Muhammad Zen dan Muhammad Arif Hadiwinata, *Desentralisasi Pendidikan Setengah Hati*, dapat diakses di http://www.bit.lipi.go.id/masyarakat-literasi/index.php/desentralisasi-pendidikan-setengah-hati?joscclean=1&comment_id=404, akses tanggal 8 Januari 2015. Lihat juga Badaruddin Nasir, *Pengembangan Pendidikan Dalam Rangka Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, dalam *Jurnal PREDIKSI* , No.12/Th.IX/Pebruari 2011

implementasi kurikulum,⁸⁶ rekrutment tenaga kependidikan, pembiayaan pendidikan, pengembangan sumber daya pendidik, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Semuanya masih terkait pendidikan formal, belum lagi tanggung jawab pemerintah di bidang pendidikan informal dan non formal yang masih jauh dari harapan.

Desentralisasi/otonomi pendidikan pada prinsipnya, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi pendidikan di daerahnya. Pemerintah daerah harus memahami visi pendidikan nasional dan menyusun perencanaan tata kelola pendidikan berdasarkan visi tersebut. Kepala dinas pendidikan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan adalah orang yang dipilih berdasarkan pertimbangan kecakapan, dan sosok yang memiliki kemampuan memahami persoalan pendidikan di daerahnya.

Salah satu yang merusak tatanan kebijakan otonomi pendidikan adalah ketidakmampuan pemerintah daerah melepaskan diri dari praktik politik oligarki, terutama ketika pimpinan kepala daerah masih berpotensi menduduki jabatan pada periode berikutnya. Akibatnya, lingkungan birokrasi pemerintahan, sering dikelilingi oleh orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas yang sesuai dengan bidang yang seharusnya mereka pimpin. Beberapa daerah bahkan melakukan mutasi pejabat hingga beberapa kali, padahal usia pemerintahan masih baru.

Melalui kewenangan otonomi daerah, pemerintah daerah sebagai ujung tombak pendidikan, seyogyanya menyusun rencana

86 Berita Terkait kurikulum, adalah ditundanya implementasi kurikulum 2013 setelah sebelumnya di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dinyatakan resmi berlaku . <http://www.sekolahdasar.net/2013/06/kurikulum-2013-ditunda-tidak-diterapkan.html> akses tanggal 8 januari 2015

pembangunan pendidikan yang bersifat terpadu. Ada tiga hal yang dapat dilakukan: *Pertama*: membangun sinergitas antar instansi di lingkup pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan pendidikan. *Kedua*: Melakukan pemetaan pendidikan dan rencana aksi yang konstruktif sesuai dengan potensi daerah, *Ketiga*: melakukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan terhadap rencana yang telah ditentukan.

Membangun sinergitas antar instansi dalam lingkup pemerintah daerah dapat dilakukan melalui koordinasi bupati/walikota yang dituangkan dalam rencana aksi pembangunan pendidikan. Setiap instansi/dinas melakukan koordinasi untuk berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di daerah. Misalnya Kepolisian Resort (Polres), Kejaksaan, Kehakiman, Dinas Pendidikan, Kodim (TNI), melakukan kerjasama bagi pengembangan pendidikan di wilayah tugas mereka. Misalnya program polisi masuk sekolah, hakim masuk sekolah, atau TNI masuk sekolah yang bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada para siswa. Hal-hal seperti ini jarang terdengar menjadi program di daerah. Hal-hal kreatif semacam itu tidak terpikirkan oleh para pembuat kebijakan di daerah.

Politik dan Pendidikan di Era Otonomi Daerah

Kekuasaan politik secara tidak langsung masuk dalam sistem pendidikan.⁸⁷ Tanpa disadari sistem pendidikan sering menjalankan berbagai macam kepentingan penguasa. Bahkan tata kelola pendidikan diatur dan diarahkan oleh penguasa. Karenanya dalam reformasi pendidikan dewasa ini dikembangkan kesadaran masyarakat dan peserta didik terhadap adanya *hidden curriculum* dibalik kurikulum sistem pendidikan. Selanjutnya, terkait

87 Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Yogyakarta: Med Press 2008), h.8

peran Negara terhadap proses pendidikan secara teoritis dapat dikemukakan dua perspektif, yaitu perspektif peserta didik dan perspektif kajian budaya.

1. Perspektif Peserta didik

Dalam perspektif peserta didik, yang dijadikan pusat perhatian ialah peserta didik dalam proses belajar mengajar. Peserta didik dalam proses belajar berkaitan dengan tujuan pendidikan,⁸⁸ metodologi, dan evaluasi hasil belajar. Kegiatan-kegiatan tersebut didukung oleh sistem internal, yaitu; 1) pembuat kebijakan, 2) manajemen dan 3) service. Selanjutnya, keseluruhan sistem tersebut didukung oleh sistem eksternal, yaitu; 1) biaya, 2) kekuatan politik dan 3) kondisi ekonomi.

Dalam pandangan mikro ini masing-masing komponen mempunyai permasalahannya sendiri dalam pengembangannya. Negara dapat berbuat sesuatu atau melakukan intervensi dalam perumusan tujuan, penentuan metodologi dan cara evaluasi pembelajaran. Keseluruhan upaya Negara tersebut tergantung kepada pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan, sistem manajemen yang digunakan, serta service pendidikan yang diberikan dengan bantuan Negara. Keseluruhannya juga tergantung kepada budaya masyarakat untuk menopang dan berkomitmen atas terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

2. Perspektif Studi Kultural

Dalam perspektif budaya, sistem pendidikan merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem budaya, sosial, politik dan ekonomi

88 Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam, dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 284

sebagai suatu keutuhan.⁸⁹ Dalam hal ini, antara Negara dan pendidikan merupakan sistem yang terintegrasi dalam sistem kekuasaan. Peran Negara dalam perspektif ini dapat bersifat positif apabila lembaga-lembaga pendidikan juga mempunyai control terhadap pelaksanaan kekuasaan Negara.

Lembaga pendidikan dalam perspektif ini bukanlah merupakan kepanjangan tangan dari kekuasaan Negara, melainkan sebagai partner dari Negara dalam melaksanakan kekuasaannya. Hal ini mempunyai implikasi yang sangat jauh dalam metodologi pendidikan, dalam manajemen dan service pendidikan terhadap rakyat banyak. Menurut Tilaar, Negara dan pendidikan merupakan system yang terintegrasi dalam system kekuasaan.⁹⁰

Saat ini kebijakan pendidikan telah menjadi tema perdebatan publik dan kompetisi antar partai politik. Dalam kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden, misalnya pendidikan menjadi salah satu isu sentral dalam materi kampanye atau dalam rumusan visi dan misi para kandidat. Berbagai isu dan pendekatan pendidikan sering dipertaruhkan di arena publik. Di mana para guru-guru telah tampil menjadi kelompok militan yang dengan gigih memperjuangkan hak-hak mereka. Di Indonesia misalnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang selama masa Orde Baru menjadi anak manis penguasa, sekarang cukup kritis terhadap berbagai kebijakan pendidikan di negeri ini, terutama kebijakan yang ada kaitannya dengan nasib dan profesi guru.

89 Mohammad Ali, Pendidikan Untuk Membangun Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi, (Jakarta: Imtima, 2009), h. 60.

90 H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural, (Magelang: Indonesia Tera, 2008), h. 154.

Hambatan yang terjadi karena dinamika politik salah satunya terjadi pada bidang kurikulum, dimana penerapan kurikulum di Indonesia berlaku selama 10 tahun. Tiap era atau rezim penguasa memiliki kebijakan masing-masing terkait dengan program pendidikan yang diinginkan. Sehingga ketika pergantian era akan berpengaruh terhadap tujuan dan perencanaan awal kurikulum tersebut. Seperti contoh pada masa reformasi kurikulum yang dipakai adalah KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dimana implementasi terhadap penyelenggaraan masih terpusat, sedangkan pada era penerapan KTSP pendidikan didesentralisasikan sehingga dalam proses ini terjadi kemunduran disebabkan oleh belum terselesaikannya kebijakan satu sudah tergantikan dengan kebijakan yang baru. Didalam hal ini proses politik dan kekuasaan malah menghambat jalannya penyelenggaraan pendidikan.

Sedangkan hal-hal yang menghambat politik dan kekuasaan dalam pendidikan antara lain budaya dan kualitas SDM. Pada bidang budaya, di Indonesia yang masyarakatnya multikultural mempunyai budaya yang berbeda satu sama lain, pada suatu daerah proses penanganannya tidak bisa disamakan dengan daerah yang lain.

Di Papua misalnya, progres pendidikan disana jauh tertinggal ketimbang yang terjadi di Pulau Jawa. Proses birokrasi yang berbelit-belit dan budaya masyarakatnya yang kurang peduli terhadap pendidikan menjadikan paham curiga yang menghambat masuknya pengaruh politik dalam hal pendidikan, sehingga tujuan penguasa untuk menanamkan ideologinya melalui pendidikan kurang efektif.

Seperti dipahami bahwa kebijakan politik berimplikasi luas terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan Islam. Lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan

Nasional nomor 20 Tahun 2003, telah memberi nuansa baru terhadap pendidikan Islam dibandingkan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan sebelumnya. Di dalam Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, Lembaga pendidikan yang berbentuk Madrasah terakomodasi dan berdiri sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya.

Pasca reformasi, lahirnya Undang-undang SISDIKNAS tersebut mulai berkembang paradigma baru dalam politik anggaran pendidikan agama dan keagamaan. Sebahagian menganggap bahwa undang-undang tersebut menunjukkan keberpihakan pada pemberdayaan pendidikan agama dan keagamaan.⁹¹

Tahun anggaran 2008 boleh jadi merupakan moment penting bagi politik anggaran di bidang pendidikan agama dan keagamaan, karena sebelumnya, di Tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan PP No.55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Bleid ini mengukuhkan paradigm baru kebijakan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.⁹² Di dalam Undang-undang SISDIKNAS, pendidikan agama dinyatakan sebagai bagian integral sistem pendidikan nasional.

Menurut Haidar Putra Daulay setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam dalam UU No 20/2003. Yaitu :

“Pertama, kelembagaan formal, nonformal, dan informal. Didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan

91 Asrori S.Karni, Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), h. 64

92 Pasal 12 PP Nomor 55 tahun 2007, menyataka bahwa alokasi anggaran harus adil dan merata antara sekolah negeri dan swasta.

lembaga pendidikan sekolah. *Kedua*, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yaitu pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. *Ketiga*, pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai islami dalam system pendidikan nasional.”⁹³

Signifikansi dari konsep pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No 20/2003 dalam konteks pendidikan Islam kekinian adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan Islam sangat tepat jika dijadikan paradigma dari pendidikan Nasional. Artinya, pendidikan Islam bukan dipandang sebagai pendidikan yang memiliki simbol Islam. Lebih dari itu, harusnya pendidikan Islam berperan dengan universalitas yang terkandung di dalamnya.
- b. Maksimalisasi dari implikasi pengakuan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional menjadi keniscayaan. Maksimalisasi ini dapat diawali oleh para pengelola lembaga pendidikan Islam ataupun simpatisan pendidikan Islam yang duduk sebagai pengambil kebijakan
- c. Signifikansi makna dari Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran diartikan sebagai suatu proses yang wajib dilaksanakan disetiap jalur, jenjang, dan tingkat satuan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang bermuara pada peningkatan iman dan takwa peserta didik.

93 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 9

Daftar Pustaka

- A.Fatah Yasin, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*, (Malang:UIN-Malang Press, 2008)
- Abdurrahman, *Pengelolaan Pengajaran*. Makassar: Bintang Selatan, 1994)
- Ahmad D.Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987)
- Alfinar Azis, *Psikologi Pendidikan*,(Jakarta: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, Departemen Agama RI, 2003)
- Alisuf Sabri, *Ilmu Pendidikan*. (Cet. I, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1999)
- Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam Dep.Agama RI.,2003)
- Asyumardi Azra, *Masalah Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*, Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan tahun 2002, yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta bekerjasama dengan Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia, tanggal 8 s/d

10 agustus 2002.

Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Dep. P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1987

Djumransjah, *Pendidikan Islam, Menggali "tradisi" Mengukuhkan Eksistensi*, Cet. 1, (Malang: UIN-Malang Press, 2007)

Dwi Nugroho Hidayanto, *Mengenal Manusia dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Liberty, 1988),

Edward Humrey, *Encyclopedia Internasional*. (New York: Grolier, 1975

Freemont E.Kazt dan James E. Rosenzweig , *Organisasi dan Manajemen*, Jilid 1, (Cet. Ke-4), Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*. (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997)

George J.Mouly, *Psychology of Effective Teaching*, New York, Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1973.

Hadari Nawawi, *Pendidikan dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993)

Hanafi Iadjid, *Pengembangan Kurikulum: Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005)

Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, cet.3,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003)

Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthy, *al-Jami' al-Shagir*, juz I, (T.tp., tp. T.th.).

John S.Brubacher, *Modern Philosophies of Education*, 4th edition (New

- Delhi, Tata Mc Grow Hill Publishing Company Ltd., 1981)
- Jumransyah dan Abdul Malik KA., *Pendidikan Islam, Menggali “tradisi” Mengukuhkan Eksistensi*, cet.1, (Malang: UIN-Malang Press, 2007)
- Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Mastuhu, *Sistem Pendidikan Nasional Visioner*, Cet.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Mudjia Rahardjo (ed), *Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan*, Cet.2, (Malang: UIN Malang Press, 2006)
- Muhammad In’am Esha dan Helmi Syaifuddin (ed.), *Himpunan Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Malang*, (Malang: UIN Malang Press, 2006)
- Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996)
- Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)
- Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru, 1992)
- S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Siti Meichati, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: FIP- IKIP, 1976)

- Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta:FIP-IKIP Yogyakarta, 1986)
- Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional dalam Percaturan Dunia Global*, cet.1,(Jakarta: PSAP-Muhammdiyah, 2006)
- Syaifuddin Sabda, *Desain Pengembangan Model Kurikulum Terpadu IPTEK dan IMTAQ*, (Jakarta: Quantum Teaching, 1995)
- Tarsa, *Basic Kompetensi Guru*, (Jakarta: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI., 2003),
- Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Integrasi dan Kompetensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Undang-undang RI. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wens Tenlain, dkk., *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)
- Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Prenada Media, 2005),
- Yusak Burhanuddin, *Administrasi Pendidika* (Bandung: Pustaka Setia, 1998)

